



LAPORAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI PROGRAM NAGARI BERSIH NARKOBA (BERSINAR) DI KABUPATEN TANAH DATAR

Disusun oleh :

Nama : DENISA SUWANDI PUTRI, S.I.P
NIP : 20001031 202506 2 002
Unit Kerja : BIDANG KESATUAN BANGSA – BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR
Jabatan : PENATA KELOLA PEMERINTAHAN

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REGIONAL BUKITTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

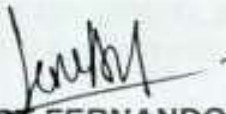
**LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN AKTUALISASI**

**OPTIMALISASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
MELALUI PROGRAM NAGARI BERSIH NARKOBA
(BERSINAR) DI KABUPATEN TANAH DATAR**

NAMA : DENISA SUWANDI PUTRI, S.I.P
NIP : 20001031 202506 2 002
UNIT KERJA : BIDANG KESATUAN BANGSA – BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR

Telah diseminarkan Rancangan Aktualisasi pada 28 Agustus 2025

Mengetahui
Coach,



LEO AGUST FERNANDO, S.KOM, MM

NIP. 19860809 201402 1 004

Menyetujui
Mentor,



SURADI, S.SOS

NIP. 19740319 200003 1 006

**LEMBARAN PENGESAHAN
EVALUASI AKTUALISASI**

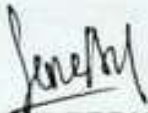
**OPTIMALISASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
MELALUI PROGRAM NAGARI BERSIH NARKOBA
(BERSINAR) DI KABUPATEN TANAH DATAR**

NAMA : DENISA SUWANDI PUTRI, S.I.P
NIP : 20001031 202506 2 002
JABATAN : PENATA KELOLA PEMERINTAHAN
INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Telah diseminarkan Evaluasi Aktualisasi pada
Hari Jumat, Tanggal 10 Oktober 2025

Bukittinggi, 10 Oktober 2025

COACH



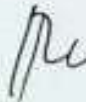
LEO AGUST FERNANDO, S.KOM, MM
NIP. 19860809 201402 1 004

MENTOR



SURADI, S.SOS
NIP. 19740319 200003 1 006

PENGUJI



ARYO FERNANDES, S.Si.M.M
NIP. 19850112 201001 1 020

**BERITA ACARA
SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI**

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 28 Agustus 2025
Pukul : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : PPSPDM Regional Bukittinggi (Via Zoom Meeting)

Telah Diseminarkan Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan Enam (VI)
Tahun 2025

JUDUL : OPTIMALISASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
MELALUI PROGRAM NAGARI BERSIH NARKOBA
(BERSINAR) DI KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA : DENISA SUWANDI PUTRI, S.I.P
NIP : 20001031 202506 2 002
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA/ IIIa
INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
JABATAN : PENATA KELOLA PEMERINTAHAN
KELAS/KELOMPOK : KELOMPOK 1
NO. ABSEN : A6.1.4

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan
Coach/Moderator.

COACH


LEO AGUST FERNANDO, S.KOM, MM
NIP. 19860809 201402 1 004

PENGUJI


ARYO FERNANDES, S.SI,M.M
NIP. 19850112 201001 1 020

PESERTA


DENISA SUWANDI PUTRI, S.I.P
NIP. 20001031 202506 2 002

MENTOR


SURADI, S.SOS
NIP. 19740319 200003 1 006

**BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 09 Oktober 2025
Pukul : 08.00 – 17.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting

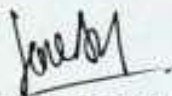
Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan Enam (6) Tahun 2025

JUDUL : OPTIMALISASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
MELALUI PROGRAM NAGARI BERSIH NARKOBA
(BERSINAR) DI KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA : DENISA SUWANDI PUTRI, S.I.P
NIP : 20001031 202506 2 002
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA/ IIIa
INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
JABATAN : PENATA KELOLA PEMERINTAHAN
KELAS/KELOMPOK : KELOMPOK 1
NO. ABSEN : A6.1.4

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

COACH



LEO AGUST FERNANDO, S.KOM, MM
NIP. 19860809 201402 1 004

PENGUJI



ARYO FERNANDES, S.SI,M.M
NIP. 19850112 201001 1 020

PESERTA



DENISA SUWANDI PUTRI, S.I.P
NIP. 20001031 202506 2 002

MENTOR



SURADI, S.SOS
NIP. 19740319 200003 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya karya tulis dengan judul ***“Optimalisasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) Di Kabupaten Tanah Datar”*** dapat diselesaikan dengan baik.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia, mengganggu stabilitas keamanan, serta menurunkan produktivitas masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya langkah nyata yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) berupaya menjadikan lingkungan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Namun, implementasi Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan data pemetaan daerah rawan, kurangnya sarana prasarana, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Salah satu langkah strategis adalah melalui digitalisasi pemetaan titik rawan narkoba yang tidak hanya mempermudah monitoring dan evaluasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan narkoba.

Melalui laporan aktualisasi ini, penulis berupaya memberikan gambaran mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang pencegahan narkoba. Harapannya, laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban akademis dalam pelaksanaan Latsar CPNS, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tanah Datar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi aparat sipil negara, pemerintah daerah, serta masyarakat luas dalam upaya bersama mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

Batusangkar, 02 Oktober 2025
Penulis

Denisa Suwandi Putri, S.I.P
NIP. 20001031 202506 2 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN RANCANGAN AKTUALISASI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI AKTUALISASI.....	ii
BERITA ACARA SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI.....	ii
BERITA ACARA SEMINAR EVALUASI AKTUALISASI.....	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA	6
A. Profil Instansi	6
B. Profil Peserta	23
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI.....	26
A. Deskripsi Isu.....	26
B. Analisis Core Isu	29
C. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu.....	31
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	34
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	34
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi.....	36
C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (Ber Akhlak).....	65
D. Capaian Penyelesaian Core Isu.....	66
E. Manfaat Terselaksainnya Core Isu.....	68
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skor Analisis Isu Menggunakan Metode USG	30
Tabel 4.1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	35
Tabel 4.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	64
Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Rencana Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK).....	65
Tabel 4.4 Matrik Capaian Penyelesaian Core Isu.....	67
Tabel 4.5 Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar	6
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar ...	10
Gambar 2.3 Foto Peserta.....	23
Gambar 3.2 Contoh Digitalisasi Pemetaan Daerah Rawan Narkoba	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Lampiran laporan mingguan ke-1
2. Lampiran 2. Lampiran laporan mingguan ke-2
3. Lampiran 3. Lampiran laporan mingguan ke-3
4. Lampiran 4. Lampiran laporan mingguan ke-4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia, mengganggu stabilitas keamanan, serta menurunkan produktivitas masyarakat. Pemerintah telah menggulirkan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, salah satunya melalui Program Bersih Narkoba (Bersinar) yang bertujuan menjadikan lingkungan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, terbebas dari penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 3 huruf e menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tugas tersebut berkaitan erat dengan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar sebagai fasilitator pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Salah satu misi Kesbangpol di bidang kesatuan bangsa adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, mengumpulkan serta menganalisis data titik rawan narkoba, dan melibatkan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam program pencegahan.

Namun, implementasi Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi kendala. Keterbatasan data pemetaan daerah rawan narkoba, minimnya sarana prasarana pendukung, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat. Hal ini sejalan dengan hasil survei BNN dan LIPI yang menekankan pentingnya intervensi daerah melalui Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN).

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penanganan isu narkoba. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mendorong aparatur sipil negara untuk menjadi pelaksana kebijakan publik yang profesional, adaptif, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemetaan dan monitoring program. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci agar Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) dapat berjalan lebih efektif, berkesinambungan, dan tepat sasaran.

Berdasarkan isu permasalahan tersebut, penulis menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi **mengenai “Optimalisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

- Mampu menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari berbagai mata pelatihan, seperti wawasan kebangsaan, semangat dan perilaku bela Negara, nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), manajemen PNS, serta kompetensi teknis sesuai tugas di unit kerja..
- Memiliki kemampuan dalam menelaah dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lingkungan kerja.

- Mampu mengembangkan inovasi dan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi unit kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam laporan aktualisasi ini adalah untuk:

1. Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan titik rawan narkoba melalui digitalisasi data berbasis peta interaktif.
2. Mendukung optimalisasi Program Nagari Bersinar di Kabupaten Tanah Datar dengan meningkatkan akurasi data dan transparansi informasi.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder terkait dalam upaya bersama memberantas penyalahgunaan narkoba.
4. Menyediakan media yang lebih efektif bagi pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap daerah rawan narkoba.

C. Ruang Lingkup

1. Batas Kegiatan

Kegiatan aktualisasi dibatasi pada upaya mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penguatan Program Nagari Bersih

Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tanah Datar. Fokus kegiatan diarahkan pada pemetaan daerah rawan narkoba berbasis digital, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini tidak mencakup penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi lebih menekankan pada aspek pencegahan, edukasi, monitoring, dan tata kelola program.

2. Digitalisasi

Digitalisasi dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk mengubah data manual menjadi sistem digital yang lebih efisien, terintegrasi, dan akurat. Dalam kegiatan ini, digitalisasi diwujudkan melalui pemetaan titik rawan narkoba berbasis peta interaktif di Kabupaten Tanah Datar sebagai media pendukung pengambilan keputusan dan monitoring. Di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

3. Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar)

Program Nagari Bersih dari Narkoba (Bersinar) adalah program yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan nagari/desa/kelurahan yang memiliki ketahanan terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program ini berfokus pada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan di tingkat nagari, sehingga masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari narkoba.

4. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan aktualisasi dilaksanakan pada Senin 1 September 2025. Tempat pelaksanaan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar yang merupakan unit kerja penulis sebagai Penata Kelola Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. PROFIL INSTANSI

1. Sejarah Instansi



Gambar 2.1

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang bertanggung jawab sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, urusan politik ditangani oleh Kantor Sosial Politik sebagai instansi vertikal. Memasuki era Reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

(Kesbanglinmas) sebagai gabungan dari Kantor Sosial Politik dan Kantor Mawil Hansip.

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, nomenklatur Kesbanglinmas tetap dipertahankan dengan fungsi menangani urusan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Perubahan signifikan terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga: urusan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Presiden didelegasikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota, dan dalam pelaksanaannya ditangani oleh perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sejak saat itu, fungsi perlindungan masyarakat dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024, dimana pada tanggal 15 Januari 2024 status Kantor Kesbangpol resmi meningkat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan pelantikan pejabat struktural pada 23 Januari 2024.

Lokasi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar berada di Jalan Raya Batusangkar - Bukittinggi No. 310 Simpang Asrama, Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab. Lokasi ini

berbeda dengan pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung, dikarenakan mempertimbangkan jarak dengan pusat kegiatan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dibawah Kepala Badan ada Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan . Sekretariat terdiri dari dua sub bagian yaitu Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan. Serta memiliki dua bidang diantaranya Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang masing-masingnya dikepalai oleh Kepala Bidang. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar didukung dengan empat belas (12) orang ASN, 4 orang PPPK dan PPPK paruh waktu sebanyak enam (6) orang.

2. Visi Misi Instansi

Adapun Visi dan Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar yaitu:

Visi: Terwujudnya Masyarakat yang Berideologikan Pancasila, Berwawasan Kebangsaan dan Demokratis.

Misi:

1. Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan Kesadaran Bela Negara, Ketahanan Bangsa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kebhinekaan dan Toleransi dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan Kewaspadaan Dini guna Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini dalam mengantisipasi berbagai potensi bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dan Penanganan Konflik Sosial di Bidang ipoleksosbudhankam.
3. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kesadaran berpolitik.
5. Meningkatkan Pengawasan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menjamin agar Kinerja Ormas berjalan dengan tujuan dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Meningkatkan pelayanan publik urusan Pemerintahan Umum.

3. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Datar yang mengatur tentang susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Datar

4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan,
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program anggaran dan keuangan. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan protokol, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang

milik negara, barang milik daerah, dan administrasi Jabatan Fungsional yang menjadi tanggung jawab Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan persuratan,
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor,
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah,
- e. Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- d. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- e. Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan,
- f. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- g. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- h. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdapat kelompok Jabatan Fungsional

dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

5. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi merujuk kepada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Tercantum pada Pasal 4 yang berbunyi, “Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah disebut dengan 321 CDI, yakni Cerdas, Cepat, Cermat, Dedikasi, Disiplin, dan Inovatif.”

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memberikan panduan kepada ASN di lingkungan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar. Adapun nilai-nilai yang tercermin di dalam Visi dan Misi kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Profesionalitas

Menempatkan aparatur yang kompeten dan ahli sesuai bidangnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

3. Integritas

Menjunjung tinggi komitmen, kejujuran, serta konsistensi dalam setiap tindakan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Efektif dan Efisien

Memberikan pelayanan yang tepat, cepat, serta berdaya guna sehingga mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang bijak.

5. Transparansi

Menyelenggarakan pelayanan dengan prinsip keterbukaan, baik dalam penyampaian informasi maupun prosedur pelayanan.

6. Konsistensi

Secara berkesinambungan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan prinsip kepastian dan ketetapan.

7. Kepercayaan

Penerapan nilai-nilai di atas akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar.

B. PROFIL PESERTA



Gambar 2.3
Foto Peserta

NAMA : Denisa Suwandi Putri, S.I.P
 TEMPAT TANGGAL LAHIR : Pekanbaru, 31 Oktober 2000
 PENDIDIKAN TERAKHIR : S-1 Ilmu Pemerintahan
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Riau
 NIP : 20001031 202506 2 002
 PANGKAT/GOL. : III A
 KELAS/KELOMPOK : Satu (1)
 NO. PRESENSI : A6.1.4
 JABATAN : Penata Kelola Pemerintahan
 INSTANSI : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
 Tanah Datar

Penulis sendiri merupakan salah satu staf di bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dengan jabatan Penata Kelola Pemerintahan. Dasar hukum penata kelola pemerintahan

yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kepmen PANRB) Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mencabut Kepmen RB Nomor 11 Tahun 2024 dan menjadi aturan paling mutakhir mengenai nomenklatur jabatan pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Berdasarkan analisis jabatan (Anjab) Penata Kelola Pemerintahan, jabatan Penata Kelola Pemerintahan bertugas melakukan analisis dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi di bidang pemerintahan daerah. Tugas pokok meliputi :

1. Mengumpulkan bahan penataan pemerintah daerah melalui surat atau alat komunikasi lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dari petunjuk atasan,
2. Menganalisis bahan penataan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas,
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/ instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran dan ketetapan dalam penyusunan rancangan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan,
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban,

5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Isu

1. Isu ke – 1: Minimnya Pemetaan Daerah Rawan Narkoba

1. Kondisi

Salah satu permasalahan dalam upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Tanah Datar adalah belum optimalnya pemetaan daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kondisi ini menyebabkan program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi belum tepat sasaran. Minimnya data dan informasi yang akurat membuat aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun instansi terkait sulit menentukan prioritas wilayah intervensi.

Akibatnya, penyalahgunaan narkoba berpotensi terus menyebar hingga ke wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Tanpa adanya pemetaan yang komprehensif, strategi pengendalian narkoba akan berjalan parsial, kurang efisien, dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor untuk melakukan pemetaan berbasis data dengan melibatkan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, serta lembaga terkait agar program Bersinar (Bersih dari Narkoba) benar-benar efektif di Kabupaten Tanah Datar.

2. Dampak Jika Isu Tidak terselesaikan

a. Sulitnya Deteksi Awal

Daerah dengan potensi kerawanan narkoba tidak teridentifikasi dengan jelas, sehingga aparat kesulitan melakukan pencegahan dini.

b. Program Pencegahan Tidak Tepat Sasaran

Tanpa peta kerawanan, intervensi yang dilakukan cenderung menyeluruh, tidak fokus, dan kurang efektif.

c. Meningkatnya Risiko Penyebaran Narkoba

Wilayah rawan yang tidak terpantau berpotensi menjadi pusat peredaran baru.

d. Lambatnya Respon Aparat

Ketiadaan data spasial membuat aparat terlambat mengantisipasi dan menindak kasus di daerah rawan.

e. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Tanpa kanal pelaporan dan peta terbuka, masyarakat kurang dilibatkan dalam pengawasan lingkungan.

f. Kurangnya Transparansi & Kepercayaan Publik

Masyarakat sulit mengetahui sejauh mana pemerintah menangani persoalan narkoba, sehingga kepercayaan publik menurun.

g. Terganggunya Ketahanan Sosial Daerah

Penyalahgunaan narkoba berpotensi meningkat dan berdampak pada keamanan, kesehatan, dan kualitas generasi muda.

3. Keterkaitan Isu dengan substansi Mata Pelatihan Agenda 3 (Manajemen ASN atau Smart ASN) yang relevan

Minimnya pemetaan daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program pemerintah, termasuk pada aspek pengumpulan data, analisis situasi, dan penentuan prioritas wilayah intervensi. Dari perspektif manajemen ASN, hal ini erat kaitannya dengan fungsi ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik. ASN yang profesional seharusnya mampu menyusun basis data yang akurat, melakukan riset lapangan, serta mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk memetakan daerah rawan narkoba secara tepat. Jika pemetaan tidak dilakukan dengan baik, maka program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi akan cenderung kurang efektif.

Dalam konteks Smart ASN, isu ini juga mencerminkan perlunya penguatan karakter ASN sesuai dengan enam pilar utama. Integritas menuntut ASN untuk jujur dan objektif dalam pengumpulan serta pelaporan data, tanpa manipulasi kepentingan. Profesionalisme mengharuskan ASN bekerja berdasarkan metode ilmiah, bukan sekadar

asumsi. Penguasaan teknologi dapat dimanfaatkan dengan membangun sistem informasi berbasis digital yang memetakan daerah rawan narkoba secara real-time. Kemampuan membangun jejaring juga sangat penting, karena pemetaan daerah rawan narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi, tetapi harus melibatkan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, sekolah, hingga lembaga adat di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, isu minimnya pemetaan narkoba dapat menjadi momentum bagi ASN untuk menunjukkan kualitas manajemen birokrasi yang modern, adaptif, dan responsif terhadap tantangan sosial.

B. Analisis Core Isu

Beberapa penyebab isu “Optimalisasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tanah Datar” adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Pemetaan Daerah Rawan Narkoba
2. Terbatasnya Sumber Daya (SDM dan Anggaran) dalam Mendukung Program Bersinar
3. Belum Adanya Layanan Pelaporan Daerah Rawan Narkoba

Untuk mendapatkan penyebab isu prioritas akan digunakan teknik USG (Urgency, Seriousness, Growth), dimana:

1. Urgency, menggambarkan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindak lanjuti.
2. Seriousness, menggambarkan seberapa serius isu atau masalah tersebut memberikan dampak yang buruk terhadap suatu organisasi/instansi.
3. Growth, menggambarkan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu atau masalah tersebut jika tidak diselesaikan.

Berikut adalah hasil analisis terhadap 3 (tiga) penyebab isu menggunakan metode USG, untuk menentukan penyebab isu yang paling utama.

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Prioritas
		U	S	G		
1	Minimnya Pemetaan Daerah Rawan Narkoba	5	4	5	14	1
2	Terbatasnya Sumber Daya (SDM dan Anggaran) dalam Mendukung Program Bersinar	3	3	4	10	3
3	Belum Adanya Layanan Pelaporan Daerah Rawan Narkoba	3	4	4	11	2

Tabel 3.1 Skor Analisis Isu Menggunakan Metode USG

Berdasarkan analisis core isu dengan metode USG di atas, dapat diketahui bahwa penyebab isu yang menempati posisi pertama adalah **“Minimnya Pemetaan Daerah Rawan Narkoba di Kabupaten Tanah Datar”**.

C. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Berdasarkan hasil analisis isu dengan metode USG, dapat diketahui penyebab utama dari isu belum adanya pemetaan daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar oleh karena itu dibutuhkan inovasi berbasis data dan teknologi untuk memetakan daerah rawan narkoba secara partisipatif dan terintegrasi.

Pemetaan daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi berbasis Google My Maps dan Form Pelaporan Cepat yang terintegrasi dalam sebuah website sederhana. Gagasan ini hadir sebagai solusi atas belum adanya sistem yang mampu mengidentifikasi secara jelas wilayah dengan tingkat kerawanan narkoba.

Melalui Google My Maps, data yang dikumpulkan dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah, tenaga kesehatan, pendidikan, dan laporan masyarakat dapat divisualisasikan secara interaktif. Peta tersebut menampilkan titik-titik lokasi rawan dengan kategori kerawanan (tinggi, sedang, rendah) menggunakan simbol atau warna berbeda, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak.

Untuk memperkuat akurasi data, disediakan Form Pelaporan Cepat yang dapat diakses masyarakat secara online. Formulir ini memungkinkan warga melaporkan aktivitas mencurigakan atau kasus narkoba di sekitar lingkungannya hanya dengan mengisi data lokasi, kronologi singkat, serta melampirkan bukti pendukung. Laporan masyarakat yang masuk akan

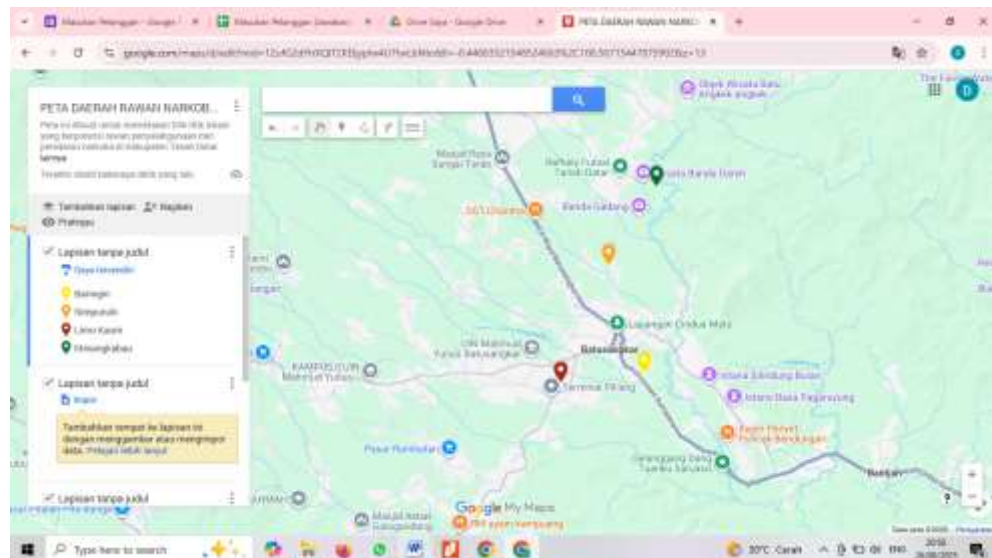
otomatis tersimpan dalam database dan langsung ditampilkan di peta setelah melalui proses verifikasi. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan
2. Mengidentifikasi data awal (lokasi rawan narkoba, data BNN, aparat, masyarakat).
3. Membuatkan Form Pelaporan Cepat (Google Form) “SIGAP” yang bisa diisi oleh masyarakat/relawan untuk melaporkan titik rawan.
4. Mengolah data dari *Spreadshet* ke Google My Maps.
5. Mengadakan sosialisasi terkait Digitalisasi Pemetaan Daerah Narkoba ke instansi Badan Kesbangpol, BNNK, Polres & Satnarkoba, serta Instansi terkait lainnya.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan dari database.

Dengan adanya inovasi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat dapat memiliki alat monitoring berbasis data dan teknologi yang efektif untuk mendeteksi dini daerah rawan narkoba. Pemetaan yang akurat akan mempermudah langkah pencegahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung program pemberantasan narkoba secara kolaboratif.

Contoh pemetaan daerah rawan narkoba pada peta digital (Google My Maps atau QGIS), titik-titik daerah rawan bisa ditandai dengan warna yang berbeda berdasarkan tingkat keseriusannya, diantaranya:

- Merah = Rawan Bahaya
- Biru = Rawan Siaga
- Kuning = Rawan Waspada
- Hijau = Rawan Aman



Gambar 3.2

Contoh Digitalisasi Pemetaan Daerah Rawan Narkoba di Kabupaten Tanah Datar

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SEPTEMBER				OKTOBER
		I	II	III	IV	I
1	Kegiatan 1 (1 s/d 2 September 2025) Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan.					
2	Kegiatan 2 (3 s/d 4 September 2025) Mengidentifikasi data awal (lokasi rawan narkoba, data BNN, aparat, masyarakat).					
3	Kegiatan 3 (8 s/d 12 September 2025) Membuatkan Form Pelaporan Cepat (Google Form) “SIGAP”					

	yang bisa diisi oleh masyarakat/relawan untuk melaporkan titik rawan.					
4	Kegiatan 4 (15 s/d 19 September 2025) Mengadakan konsultasi terkait Digitalisasi Pemetaan Daerah Rawan Narkoba ke instansi Badan Kesbangpol, BNNK Kota Payakumbuh, Polres Tanah Datar dan Padang Panjang, serta OPD terkait lainnya.					
5	Kegiatan 5 (22 s/d 30 September 2025) Mengolah data dan mengintegrasikan dari <i>Spreadsheet</i> ke <i>Google My Maps</i>					
6	Kegiatan 6 (1 s/d 2 Oktober 2025) Melakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan dari database (<i>Spreadsheet</i>).					

Tabel 4.1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar
Identifikasi Isu	:	1. Minimnya Pemetaan Daerah Rawan Narkoba 2. Terbatasnya Sumber Daya (SDM dan Anggaran) dalam Mendukung Program Bersinar 3. Belum Adanya Layanan Pelaporan Daerah Rawan Narkoba
Isu yang Diangkat	:	Minimnya Pemetaan Daerah Rawan Narkoba di Kabupaten Tanah Datar
Gagasan Pemecahan Isu	:	Optimalisasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) Di Kabupaten Tanah Datar

Minggu ke-1

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	1 s/d 2 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Jadwal rencana kegiatan aktualisasi. 2. Surat izin pelaksanaan aktualisasi. 3. Dokumentasi konsultasi dengan mentor.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Membuat jadwal rencana kegiatan aktualisasi Pada minggu pertama kegiatan aktualisasi Latsar CPNS Tahun 2025, fokus utama saya adalah menyiapkan bahan dan jadwal konsultasi dengan mentor untuk satu bulan ke depan. Mulai dari menyusun jadwal rencana kegiatan aktualisasi yang memuat tahapan, waktu pelaksanaan, serta rincian kegiatan yang akan dilakukan selama masa aktualisasi (akuntabel). Penyusunan jadwal ini bertujuan agar kegiatan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (kompeten). 2. Membuat surat izin konsultasi Membuat surat izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi Latsar sebagai bentuk administrasi resmi yang ditujukan kepada mentor (atasan langsung) agar kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan (akuntabel). Kegiatan ini meliputi penyusunan konsep surat, menyesuaikan format dengan aturan tata administrasi, melakukan pengecekan redaksi dan kelengkapan isi, serta menyampaikan kepada mentor untuk mendapat persetujuan (harmonis).	

Pengecekan redaksi surat tersebut, dilakukan oleh mentor dengan memberikan arahan dan koreksi terhadap beberapa bagian surat agar lebih rapi, jelas, serta sesuai prosedur. Dengan demikian, saya selaku peserta latsar CPNS memperoleh pemahaman praktis tentang penyusunan surat dinas sekaligus memastikan dokumen yang digunakan dalam kegiatan latsar memiliki keabsahan dan ketepatan secara formal.

3. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal rencana

Melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal rencana kegiatan aktualisasi untuk memastikan tahapan, waktu pelaksanaan, serta rincian kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan realistis untuk dilaksanakan. Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor (**kolaboratif**).

Analisa dampak jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

Analisa dampak apabila tidak diterapkan nilai BerAKHLAK di dalam kegiatan aktualisasi :

Kegiatan 1 : Membuat jadwal rencana kegiatan aktualisasi

Tahapan kegiatan : Menyusun jadwal rencana kegiatan aktualisasi yang memuat tahapan, waktu pelaksanaan, serta rincian kegiatan.

- a. Pada tahapan ini, apabila saya tidak menyusun jadwal secara cermat dan tidak mempertimbangkan keterukuran waktu, maka kegiatan bisa berjalan tidak terarah dan tidak sesuai target. Hal tersebut menunjukkan saya tidak menerapkan nilai Akuntabel, karena tidak mampu mempertanggungjawabkan efektivitas waktu dan hasil.
- b. Selain itu, jika jadwal disusun secara asal tanpa memperhatikan ketepatan tahapan, maka saya juga tidak menunjukkan sikap Kompeten, sebab sebagai ASN saya dituntut mampu

mengelola pekerjaan secara profesional dan terukur.

Kegiatan 2 : Membuat surat izin konsultasi

Tahapan kegiatan : Menyusun surat izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi sesuai tata administrasi.

- a. Jika saya tidak menyesuaikan format surat dengan aturan resmi yang berlaku, maka surat bisa dianggap tidak sah atau tidak memenuhi ketentuan administrasi. Hal ini berarti saya tidak menerapkan nilai Akuntabel, karena dokumen yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal.
- b. Apabila saya menulis surat tanpa memperhatikan kerapian bahasa dan kelengkapan isi, maka saya mengabaikan nilai Harmonis, sebab surat tersebut bisa menimbulkan kebingungan bagi penerima dan mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap atasan.

Kegiatan 3 : Melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal rencana

Tahapan kegiatan : Mendiskusikan rencana kegiatan aktualisasi untuk mendapat masukan dan persetujuan.

- a. Jika saya tidak terbuka terhadap masukan mentor, maka saya tidak menunjukkan sikap Kolaboratif, karena menutup ruang diskusi dan kerja sama. Hal ini bisa mengurangi kualitas rencana aktualisasi.
- b. Apabila saya tidak mendengarkan dengan baik atau tidak menghargai pendapat mentor, maka saya juga mengabaikan nilai Harmonis, karena sikap tersebut dapat merusak hubungan kerja yang seharusnya didasari rasa saling menghargai.

Keterkaitan Kegiatan Terhadap Visi, Misi dan Nilai Organisasi

Dalam kegiatan membuat jadwal rencana aktualisasi, menyusun surat izin konsultasi, dan

melakukan konsultasi dengan mentor, saya melaksanakan peran ASN yang akuntabel, kompeten, dan kolaboratif melalui perencanaan terarah, administrasi resmi sesuai prosedur, serta diskusi terbuka untuk memperoleh masukan. Kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian misi Kesbangpol Tanah Datar, khususnya **Meningkatkan Kewaspadaan Dini Dan Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Umum**, karena mendukung perencanaan yang sistematis, transparan, dan efektif. Nilai organisasi yang tercermin antara lain **akuntabilitas, profesionalitas, integritas, efektivitas, transparansi, konsistensi, dan membangun kepercayaan.**

b. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Mengidentifikasi data awal lokasi rawan narkoba (data BNN, aparat, masyarakat)
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	3 s/d 4 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Data manual dalam bentuk <i>Excel</i> . 2. Draft awal peta digital daerah rawan narkoba. 3. Notulen dan dokumentasi hasil konsultasi.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Data manual dalam bentuk <i>Excel</i> Kegiatan aktualisasi Latsar (<i>Off campus</i>) dilaksanakan di OPD masing-masing, sehingga saya berkomunikasi langsung dengan mentor di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (akuntabel). Saya menyampaikan maksud dan tujuan secara sopan dan profesional untuk memperoleh data manual terkait daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar. Namun	

saya tidak hanya menyampaikan secara lisan, saya juga menghubungi mentor melalui Whatsapp terkait permintaan data tersebut. **(harmonis)**. Data tersebut masih disimpan dalam bentuk *Excel* yang menjadi rujukan awal sebelum dilakukan proses digitalisasi ke dalam peta berbasis *Google My Maps*. **(adaptif)**.

Melalui komunikasi ini peserta mendapatkan arahan dan dukungan dari mentor untuk menggunakan data tersebut sebagai bahan pengolahan dan analisis. **(kolaboratif)**.

2. Draft awal peta digital daerah rawan narkoba

- a. Menyesuaikan format file *excel* agar kompatibel dengan *Google My Maps*, termasuk kolom nama wilayah, kategori kerawanan, dan koordinat geografis.
- b. Membuat akun *Google* baru khusus pendataan daerah rawan narkoba Kabupaten Tanah Datar.
- c. Masuk ke akun *Google*, membuka layanan *Google My Maps*, dan membuat peta baru sebagai wadah untuk menampilkan data.
- d. Mengunggah file *Excel* ke *Google My Maps* dengan fitur “Import”, memilih kolom yang akan digunakan sebagai penanda lokasi **(adaptif)**.
- e. Menyesuaikan ikon, warna, dan label pada peta sesuai kategori data (tingkat kerawanan: bahaya, siaga, waspada, dan aman) untuk memudahkan pembacaan visual.

3. Notulen dan dokumentasi hasil konsultasi

Setelah menyelesaikan lima tahapan kegiatan diatas, dihari berikutnya saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait draft awal peta digital daerah rawan narkoba untuk meminta masukan dan saran terhadap hasil visualisasi data yang telah dibuat. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peta yang ditampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan analisis, mudah dipahami, serta sesuai dengan standar informasi yang

dibutuhkan oleh instansi **(akuntabel)**. Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor **(harmonis & kolaboratif)**.

Analisa dampak jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

Kegiatan 4 : Memperoleh Data Manual dalam bentuk Excel

Tahapan kegiatan : Berkomunikasi langsung dan melalui WhatsApp dengan mentor untuk meminta data Excel terkait daerah rawan narkoba

- a. Jika saya tidak menyampaikan maksud dan tujuan secara sopan kepada mentor, maka akan mencerminkan sikap yang tidak profesional dalam berkomunikasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan mentor terhadap saya (Harmonis).
- b. Jika saya tidak melakukan tindak lanjut melalui WhatsApp, maka permintaan saya terkesan tidak serius dan kurang bertanggung jawab, sehingga data mungkin tidak diberikan tepat waktu (Akuntabel).
- c. Jika saya tidak menerima dan memanfaatkan data Excel sebagai rujukan awal, maka saya tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang tersedia di lapangan. Hal ini dapat menghambat proses digitalisasi data ke Google My Maps (Adaptif).
- d. Jika saya tidak membangun komunikasi dua arah dengan mentor, maka arahan dan dukungan yang dibutuhkan tidak akan diperoleh, sehingga kegiatan ini akan terhambat (Kolaboratif).

Kegiatan 5 : Membuat Notulen dan Dokumentasi Hasil Konsultasi

Tahapan kegiatan : Melakukan konsultasi dengan mentor terkait draft awal peta digital

- a. Jika saya tidak menyusun notulen dan dokumentasi dengan baik, maka bukti hasil konsultasi tidak akan terdokumentasi dan dapat menimbulkan masalah ketika dilakukan evaluasi (Akuntabel).
- b. Jika saya tidak berkonsultasi langsung dengan mentor, maka peta yang saya buat bisa saja tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan instansi. Hal ini menandakan kurangnya kerja sama yang baik (Kolaboratif).
- c. Jika saya tidak terbuka menerima masukan dari mentor, maka hasil visualisasi data berpotensi tidak maksimal dan tidak mudah dipahami oleh pengguna lainnya (Harmonis & Adaptif).

Keterkaitan Kegiatan Terhadap Visi, Misi dan Nilai Organisasi

Dalam kegiatan memperoleh data manual dalam bentuk Excel, menyusun draft awal peta digital daerah rawan narkoba, serta melakukan konsultasi dengan mentor, saya melaksanakan peran ASN yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi, melaporkan, dan memastikan kegiatan aktualisasi berjalan sesuai tujuan. Proses ini dimulai dengan komunikasi langsung maupun melalui media digital untuk memperoleh data awal (akuntabel dan harmonis), kemudian mengolahnya menjadi peta digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memvisualisasikannya agar mudah dipahami. Selanjutnya, melalui konsultasi dengan mentor, saya mendapatkan masukan, saran, dan persetujuan sehingga hasil yang disajikan lebih akurat, transparan, dan sesuai kebutuhan instansi (kolaboratif). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, khususnya misi Meningkatkan kewaspadaan dini guna deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini dalam mengantisipasi potensi ancaman serta penanganan konflik sosial dan misi **“Meningkatkan**

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya” melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena data daerah rawan narkoba yang telah terdigitalisasi menjadi dasar dalam upaya pencegahan. Adapun nilai-nilai organisasi yang tercermin adalah **akuntabilitas** melalui pertanggungjawaban kinerja, **profesionalitas** dengan penempatan kompetensi sesuai bidang, integritas dalam menjaga komitmen dan kejujuran, **efektivitas dan efisiensi** dalam pengolahan data, **transparansi** melalui pelaporan yang terbuka, **konsistensi** dengan pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan, serta **kepercayaan** yang terbangun dari keterlibatan aktif dalam mendukung visi **“Terwujudnya Masyarakat yang Berideologikan Pancasila, Berwawasan Kebangsaan dan Demokratis”**.

Minggu ke-2

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Membuatkan Form Pelaporan Cepat (<i>Google Form</i>) “SIGAP” dan QR Code Form, serta yang bisa diisi oleh masyarakat/relawan untuk melaporkan titik rawan
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	8 s/d 12 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Draft Desain Form Pelaporan Cepat. 2. Desain QR Code Form. 3. Uji coba, notulen dan dokumentasi hasil konsultasi. 4. Unggahan pamflet QR Code di sosmed & website instansi.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Mendesain Form Pelaporan Cepat “SIGAP” dengan format sederhana: identitas pelapor (opsional), lokasi titik rawan, deskripsi singkat, dan bukti foto pendukung Sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, peserta Latsar membuat sebuah formulir digital bernama “SIGAP” (Sistem Informasi Geospasial Anti Narkoba Partisipatif) menggunakan platform <i>Google Form</i> (kompeten). Saya membuat form dengan desain sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.	

Serta menambahkan penjelasan singkat tentang tujuan form di bagian atas.

2. Mendesain QR Code Form

Setelah *Google Form* “**SIGAP**” selesai dibuat dan semua pertanyaan telah disusun dengan lengkap, saya melanjutkan proses pembuatan *QR Code* sebagai media akses cepat menuju form tersebut. Saya menggunakan platform pembuat *QR Code* gratis yang tersedia secara online yaitu *qr-code-generator.com*, untuk menghasilkan *QR Code* yang terhubung langsung ke tautan *Google Form* (**kompeten**).

Setelah *QR Code* berhasil dibuat, saya juga melakukan tahap desain agar tampilannya lebih menarik dan komunikatif. Untuk keperluan ini, saya memanfaatkan platform desain grafis *canva* yang memungkinkan saya untuk menambahkan berbagai elemen visual seperti judul, ikon, warna, dan keterangan singkat pada *QR Code* tersebut (**adaptif**). Desain ini saya buat dengan tujuan agar *QR Code* tidak hanya sekadar berfungsi sebagai penghubung tautan, tetapi juga dapat menarik perhatian masyarakat atau relawan yang melihatnya, serta memberikan informasi yang jelas tentang fungsi *QR Code* tersebut.

3. Melakukan uji coba bersama rekan kerja di Kesbangpol dan melakukan konsultasi dengan mentor

Melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain form dan *QR Code* peta digital daerah rawan narkoba untuk meminta masukan dan validasi terhadap hasil visualisasi desain form dan *QR Code* yang telah dibuat. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peta yang ditampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan analisis, mudah dipahami, serta sesuai dengan standar informasi yang dibutuhkan oleh instansi (**akuntabel**). Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor (**harmonis & kolaboratif**).

Saya melakukan uji coba pemindaian *QR Code* yang telah dibuat menggunakan beberapa perangkat ponsel dengan sistem operasi berbeda, seperti Android dan iOS, guna memastikan fungsi *QR Code* berjalan optimal dan dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna **(kompeten)**. Proses uji coba meliputi pemindaian *QR Code* menggunakan aplikasi kamera bawaan serta aplikasi pemindai *QR Code* pihak ketiga untuk memastikan kompatibilitas yang luas. Setelah *QR Code* dipindai, saya mengecek apakah tautan secara otomatis terbuka dan langsung mengarahkan pengguna ke *Google Form* “**SIGAP**” tanpa kendala teknis seperti link error, loading lama, atau halaman yang tidak ditemukan **(akuntabel)**.

Kemudian dilakukan pula uji coba *QR Code* dan pengisian form oleh rekan kerja dan mentor untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik **(harmonis & kolaboratif)**. Uji coba ini penting agar dapat diketahui apakah *QR Code* dapat diakses dengan mudah, form dapat diisi tanpa kendala, dan data yang masuk sesuai dengan kebutuhan analisis. Dari hasil uji coba ini diperoleh masukan tambahan untuk penyempurnaan desain sebelum dipublikasikan secara lebih luas **(kompeten)**.

4. Melakukan Pamflet QR Code melalui website & media sosial instansi.

Kemudian saya melakukan publikasi pamflet digital berisi *QR Code* link form melalui website dan media sosial instansi **(adaptif)**. Publikasi ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan dan informasi tanpa harus mencari secara manual, sehingga akses menjadi lebih cepat dan praktis **(loyal)**.

Analisa Dampak Apabila Tidak Berdasarkan NDS dalam Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan 1 : Mendesain Form Pelaporan Cepat “SIGAP”

Tahapan kegiatan : Membuat form digital dengan format sederhana

Jika saya membuat form tanpa memperhatikan kemudahan bagi masyarakat **(kompeten)**, maka form tersebut bisa menjadi sulit dipahami, membingungkan, dan berpotensi tidak digunakan secara optimal oleh masyarakat. Dampaknya, partisipasi masyarakat dalam pelaporan titik rawan narkoba menjadi rendah.

Kegiatan 2 : Mendesain QR Code Form

Tahapan kegiatan : Membuat QR Code dan desain visual

- a. Jika saya hanya membuat QR Code tanpa memperhatikan tampilan desain yang menarik **(adaptif)**, maka QR Code terlihat biasa saja, kurang komunikatif, dan tidak mampu menarik perhatian masyarakat untuk mengaksesnya. Akibatnya, publikasi tidak maksimal dan tujuan sosialisasi bisa gagal tercapai.

Tahapan kegiatan : Menghubungkan QR Code dengan form SIGAP

- b. Jika saya tidak mengecek dengan detail kesesuaian tautan **(kompeten)**, kemungkinan terjadi error atau link tidak terbuka. Hal ini membuat masyarakat kesulitan mengakses form dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan publik instansi.

Kegiatan 3 : Melakukan uji coba bersama rekan kerja & konsultasi dengan mentor

Tahapan kegiatan : Konsultasi dengan mentor

- a. Jika saya tidak berkonsultasi dengan mentor **(akuntabel)**, maka hasil desain form dan QR Code bisa saja tidak sesuai standar kebutuhan instansi. Hal ini bisa berdampak pada kualitas data yang diperoleh, serta menimbulkan ketidakselarasan antara inovasi yang dibuat dengan tujuan organisasi.

Tahapan kegiatan : Uji coba bersama rekan kerja

- b. Jika saya tidak melakukan uji coba bersama rekan kerja **(harmonis & kolaboratif)**, maka saya berisiko tidak menemukan kendala teknis lebih awal. Akibatnya, ketika dipublikasikan ke masyarakat, masih ada error yang dapat mengganggu akses form sehingga menurunkan efektivitas program.

Kegiatan 4 : Melakukan publikasi Pamflet QR Code melalui website & media sosial instansi

Tahapan kegiatan : Membuat dan menyebarkan pamflet digital

- a. Jika saya tidak melakukan publikasi melalui media sosial dan website instansi **(adaptif & loyal)**, maka informasi hanya menjangkau kalangan terbatas. Dampaknya, partisipasi masyarakat menjadi rendah dan tujuan peningkatan keterlibatan publik dalam pencegahan narkoba tidak tercapai secara maksimal.

Keterkaitan Kegiatan Terhadap Visi, Misi dan Nilai Organisasi

Dalam kegiatan mendesain Form Pelaporan Cepat “SIGAP”, membuat QR Code sebagai akses cepat, melakukan uji coba bersama rekan kerja serta konsultasi dengan mentor, hingga mempublikasikan pamflet digital melalui website dan media sosial instansi, terdapat keterkaitan erat dengan kedudukan dan peran ASN sebagai pelayan publik yang berorientasi pada inovasi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Melalui form “SIGAP” yang sederhana dan responsif, serta QR Code yang dirancang menarik dan komunikatif, saya berupaya menghadirkan layanan partisipatif berbasis digital yang memudahkan masyarakat melaporkan titik rawan narkoba. Proses uji coba dan konsultasi dengan mentor mencerminkan transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai standar informasi yang

dibutuhkan instansi, sedangkan publikasi pamflet digital melalui kanal resmi instansi menunjukkan upaya adaptif dalam memperluas jangkauan layanan publik. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian misi Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, **“Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika”** serta **“Meningkatkan pelayanan publik urusan Pemerintahan Umum”**, dengan menghadirkan inovasi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Adapun nilai-nilai organisasi yang tercermin dari kegiatan ini adalah **akuntabilitas** dalam menyajikan laporan yang bertanggung jawab, **profesionalitas** melalui kompetensi dalam mendesain sistem digital, **integritas** dengan menjaga konsistensi pelaksanaan sesuai tujuan instansi, transparansi melalui keterbukaan informasi, serta **kolaborasi** dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar.

Minggu ke-3

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Mengadakan konsultasi terkait Digitalisasi Pemetaan Daerah Rawan Narkoba ke instansi Badan Kesbangpol, BNNK Kota Payakumbuh, Polres Tanah Datar dan Padang Panjang, serta OPD terkait lainnya.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	15 s/d 19 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Konsep surat undangan. 2. Surat undangan sesuai format. 3. Materi konsultasi 4. Dokumentasi kegiatan.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Mengkonsepkan surat undangan untuk kegiatan tersebut Sebelum dilaksanakannya kegiatan konsultasi tersebut, saya menyiapkan format surat untuk kegiatan sosialisasi sebagai bentuk administrasi (akuntabel). Kegiatan ini meliputi	

penyusunan konsep surat, menyesuaikan format dengan aturan tata administrasi, melakukan pengecekan redaksi dan kelengkapan isi, serta menyampaikan kepada mentor untuk mendapat persetujuan (**harmonis**).

2. Melakukan pengecekan format dan isi surat mentor

Pengecekan redaksi surat tersebut, dilakukan oleh mentor dengan memberikan arahan dan koreksi terhadap beberapa bagian surat agar lebih rapi, jelas, serta sesuai prosedur. Dengan demikian, saya selaku peserta latsar CPNS memperoleh pemahaman praktis tentang penyusunan surat dinas sekaligus memastikan dokumen yang digunakan dalam kegiatan latsar memiliki keabsahan dan ketepatan secara formal.

3. Menyiapkan materi sosialisasi (manfaat penggunaan peta digital, form pelaporan, tampilan titik rawan di *Google My Maps*.)

Saya menyiapkan materi sosialisasi terkait pemanfaatan peta digital. Pada tahap awal, saya terlebih dahulu mengumpulkan berbagai informasi dan referensi yang relevan mengenai manfaat penggunaan peta digital dalam mendukung tugas instansi, khususnya dalam pemetaan titik rawan narkoba.

Saya mulai menyusun materi yang mudah dipahami oleh peserta sosialisasi (**berorientasi pelayanan**). Saya menggunakan bahasa sederhana agar seluruh pihak, baik dari kalangan pegawai maupun mitra kerja, dapat mengerti dengan jelas apa manfaat penggunaan peta digital (**harmonis**). Saya menambahkan penjelasan tentang bagaimana form pelaporan dapat digunakan sebagai alat input data secara cepat dan praktis. Form ini dirancang agar masyarakat atau relawan bisa langsung melaporkan titik lokasi rawan, misalnya tempat nongkrong, kos-kosan mahasiswa, maupun tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi area rawan narkoba. Dalam materi yang saya siapkan, saya juga menampilkan contoh

visual berupa tampilan titik-titik rawan yang sudah dimasukkan ke dalam *Google My Maps*. Dengan tampilan tersebut, saya berharap peserta sosialisasi bisa melihat secara nyata bagaimana data dari form pelaporan akan langsung terhubung dan divisualisasikan dalam bentuk peta digital (**adaptif**). Hal ini penting agar peserta tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga menyadari bahwa sistem ini praktis dan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari (**akuntabel & kompeten**).

Saya menyusun materi sosialisasi ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa percaya diri. Bagi saya, kegiatan ini bukan hanya sekadar menyiapkan bahan presentasi, melainkan juga menjadi sarana pembelajaran untuk mengasah kemampuan komunikasi, penyusunan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tugas kedinasan. Dengan adanya materi sosialisasi yang saya buat, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas kerja instansi, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah (**loyal**).

4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Setelah menyiapkan materi, saya melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pemanfaatan peta digital dalam mendukung pemetaan titik rawan narkoba. Dalam kegiatan ini, saya berperan sebagai penyaji yang menjelaskan secara langsung kepada peserta tentang manfaat penggunaan peta digital, cara mengisi form pelaporan, serta bagaimana data yang masuk akan otomatis ditampilkan dalam *Google My Maps*. Saya berusaha menyampaikan materi dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua peserta (**harmonis**).

Selama pelaksanaan, saya menunjukkan contoh tampilan peta digital yang sudah berisi titik lokasi rawan. Dengan cara ini, peserta dapat melihat secara nyata hasil dari proses

penginputan data ke dalam form pelaporan. Saya juga membuka sesi tanya jawab agar peserta lebih interaktif dan dapat memahami secara mendalam manfaat dari sistem ini. Selain itu, saya menekankan bahwa teknologi digital ini bukan hanya membantu instansi dalam bekerja lebih efektif, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba **(kolaboratif)**.

Analisa Dampak Apabila Tidak Berdasarkan NDS

Kegiatan 1 : Mengkonsepkan surat undangan untuk kegiatan sosialisasi

Tahapan kegiatan : Penyusunan konsep surat, menyesuaikan format, melakukan pengecekan redaksi, serta menyampaikan kepada mentor untuk persetujuan.

- a. Jika pada tahapan ini saya tidak melakukan pengecekan redaksi dan kelengkapan isi surat sesuai aturan tata administrasi, maka surat undangan yang dihasilkan berpotensi tidak memenuhi standar administrasi yang berlaku, sehingga dokumen menjadi kurang valid secara formal **(akuntabel)**.
- b. Jika saya tidak menyampaikan konsep surat kepada mentor, maka saya tidak menunjukkan sikap keterbukaan dan penghormatan terhadap hierarki kerja, sehingga komunikasi dan keharmonisan dengan atasan bisa terganggu **(harmonis)**.

Kegiatan 2 : Melakukan pengecekan format dan isi surat mentor

Tahapan kegiatan : Melakukan pengecekan redaksi surat berdasarkan arahan dan koreksi dari mentor.

- a. Jika saya tidak menerima koreksi dari mentor dengan baik, maka saya melewatkan kesempatan belajar dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan prosedur penyusunan surat dinas yang berlaku **(adaptif)**.

- b. Jika saya tidak memperbaiki surat sesuai arahan mentor, maka surat tersebut bisa tidak sesuai dengan aturan formal kedinasan, dan saya dianggap kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas **(akuntabel & kompeten)**.

Kegiatan 3 : Menyiapkan materi sosialisasi (peta digital, form pelaporan, tampilan titik rawan di Google My Maps)

Tahapan kegiatan : Mengumpulkan informasi, menyusun materi dengan bahasa sederhana, serta menambahkan contoh visualisasi dalam peta digital.

- a. Jika saya tidak menyusun materi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, maka peserta sosialisasi akan kesulitan memahami manfaat peta digital, sehingga tujuan kegiatan tidak tercapai **(berorientasi pelayanan)**.
- b. Jika saya tidak menambahkan contoh visual tampilan titik rawan di Google My Maps, maka peserta tidak memperoleh gambaran nyata tentang penerapan sistem, sehingga mereka bisa menganggap konsep ini hanya teori tanpa penerapan nyata **(adaptif & akuntabel)**.
- c. Jika saya tidak menyusun materi dengan sungguh-sungguh, maka hasil yang saya berikan tidak optimal dan saya dianggap tidak menunjukkan kontribusi nyata terhadap instansi **(loyal)**.

Kegiatan 4 : Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Tahapan kegiatan : Menyampaikan materi, memberikan contoh langsung, membuka sesi tanya jawab, dan menekankan manfaat sistem peta digital.

- a. Jika saya tidak menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif dalam menyampaikan materi, maka peserta bisa merasa bingung dan tidak memahami isi sosialisasi **(harmonis & berorientasi pelayanan)**.
- b. Jika saya tidak membuka sesi tanya jawab, maka kegiatan sosialisasi menjadi satu arah dan

kurang interaktif, sehingga peserta kehilangan kesempatan memperdalam pemahaman **(kolaboratif)**.

- c. Jika saya tidak menunjukkan contoh nyata tampilan peta digital, maka peserta tidak akan melihat manfaat praktis dari sistem yang diperkenalkan, dan efektivitas sosialisasi akan berkurang **(kompeten & akuntabel)**.

Keterkaitan Kegiatan Terhadap Visi, Misi dan Nilai Organisasi

Dalam kegiatan mengkonsepkan surat undangan, melakukan pengecekan format dan isi surat bersama mentor, menyiapkan materi sosialisasi, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan peta digital untuk pemetaan titik rawan narkoba, terdapat keterkaitan erat dengan kedudukan dan peran ASN dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Sebagai seorang ASN, saya bertanggung jawab menyiapkan administrasi berupa surat undangan sesuai tata naskah dinas, melakukan koordinasi dengan mentor untuk memastikan keabsahan dokumen, serta menyusun materi sosialisasi yang mudah dipahami agar dapat mendukung efektivitas pemetaan titik rawan narkoba. Melalui pelaksanaan sosialisasi secara langsung, saya berperan dalam meningkatkan pemahaman mitra kerja mengenai pentingnya teknologi digital dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Rangkaian kegiatan ini mendukung pencapaian visi dan misi Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, khususnya misi ketiga yaitu **“Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”** Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan penerapan nilai organisasi yaitu **akuntabilitas** dalam pertanggungjawaban administrasi dan laporan, **profesionalitas** dalam penyusunan surat dan

materi sosialisasi yang sesuai prosedur, **integritas** dalam menjunjung kejujuran dan konsistensi, transparansi melalui keterbukaan informasi kepada peserta sosialisasi, serta **kolaborasi** dengan mentor dan mitra kerja sehingga membangun kepercayaan terhadap kinerja Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar.

Minggu ke-4

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Mengolah data dan mengintegrasikan dari <i>Spreadsheet</i> ke <i>Google My Maps</i>
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	22 s/d 30 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. <i>Spreadsheet</i> terstruktur. 2. Titik rawan hasil form masyarakat muncul di <i>Google My Maps</i> . 3. Peta rawan terklasifikasi dengan kode warna berdasarkan tingkat kerawanan.

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Melakukan pengecekan data ganda, mengoreksi kesalahan input, dan memastikan kelengkapan data

Pada minggu terakhir ini, saya melakukan beberapa langkah penting dalam pengolahan data. Saya melakukan pengecekan data untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi yang telah dihimpun. Proses ini meliputi identifikasi adanya data ganda, mengoreksi kesalahan input, serta memverifikasi kelengkapan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Kegiatan ini dilakukan dengan teliti dan sistematis untuk meminimalisir

potensi kesalahan yang dapat memengaruhi hasil laporan **(akuntabel)**.

Pengecekan data juga melibatkan koordinasi dengan rekan kerja maupun mentor apabila ditemukan ketidaksesuaian, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan dengan tepat **(kolaboratif)**. Melalui kegiatan ini diharapkan data yang tersimpan menjadi lebih valid, rapi, dan siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan **(kompeten)**.

Kegiatan ini membantu agar data yang digunakan lebih rapi, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, juga melatih ketelitian dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas **(akuntabel & loyal)**.

2. Mengidentifikasi data spreadsheet ke Google My Maps dengan import data otomatis

Pada tahapan ini, saya melakukan kegiatan mengintegrasikan data *spreadsheet* ke *Google My Maps*. Data yang sudah saya kumpulkan melalui form digital otomatis tersimpan di *spreadsheet*. Selanjutnya, saya mencoba menghubungkan *spreadsheet* tersebut ke *Google My Maps* dengan fitur import data otomatis. Dengan cara ini, setiap titik lokasi yang ada di dalam *spreadsheet* bisa langsung muncul di peta tanpa harus saya masukkan satu per satu secara manual **(akuntabel)**.

Proses integrasi ini saya lakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, saya menyiapkan *spreadsheet* yang berisi daftar titik lokasi kerawanan narkoba beserta keterangan tambahan seperti alamat atau kategori lokasi. Kedua, saya membuka *Google My Maps* dan memilih fitur impor data. Setelah itu, saya menghubungkan *spreadsheet* yang sudah dibuat sebelumnya. Dari hasil impor tersebut, titik-titik lokasi langsung tampil di peta *Google My Maps* dengan ikon penanda (marker) **(kompeten)**. Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat data lebih mudah dipahami dalam bentuk visual. Jika sebelumnya data hanya berupa tabel, kini informasi bisa dilihat dalam bentuk peta digital

sehingga lebih jelas letak dan sebarannya. Hal ini tentu membantu dalam proses analisis dan monitoring, khususnya untuk melihat pola daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba (**harmonis & kolaboratif**).

3. Mengklasifikasikan daerah berdasarkan status prioritas kerawanan (Bahaya, Siaga, Waspada, Aman).

Kemudian saya mulai menyusun klasifikasi daerah dengan membaginya ke dalam empat kategori, yaitu: Bahaya, Siaga, Waspada, dan Aman. Kategori ini saya buat agar memudahkan dalam membaca tingkat kerawanan narkoba di setiap lokasi (**akuntabel**).

- Bahaya dengan kode warna merah, saya gunakan untuk daerah yang sering ditemukan kasus penyalahgunaan atau peredaran narkoba.
- Waspada dengan kode warna kuning, saya berikan untuk daerah yang pernah ada kasus, meskipun tidak terlalu sering, namun tetap berpotensi tinggi.
- Siaga dengan kode warna biru, saya berikan untuk daerah yang memiliki indikasi rawan, meskipun kasus yang ditemukan sedikit.
- Aman dengan kode warna hijau, saya berikan untuk daerah yang cenderung minim potensi kerawanan.

Kegiatan klasifikasi ini saya lakukan dengan cara menandai setiap titik di *Google My Maps* sesuai status prioritasnya (**kompeten & loyal**). Dengan begitu, peta digital yang dihasilkan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengguna (**berorientasi pelayanan**).

Analisa Dampak Apabila Tidak Berdasarkan NDS dalam Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan 1 : Melakukan pengecekan data ganda, mengoreksi kesalahan input, dan memastikan kelengkapan data

Tahapan kegiatan : Pengecekan data dan koordinasi dengan mentor/rekan kerja

- a. Pada tahapan kegiatan ini, jika saya tidak melakukan pengecekan data secara teliti maka data yang tersimpan berpotensi mengandung kesalahan, seperti adanya data ganda atau input yang tidak valid. Hal ini menunjukkan saya tidak mengutamakan ketelitian **(akuntabel)**.
- b. Jika saya tidak berkoordinasi dengan mentor atau rekan kerja saat menemukan ketidaksesuaian data, maka perbaikan bisa saja terlambat dilakukan. Hal ini berarti saya tidak menjalankan sikap kerja sama dan saling membantu **(kolaboratif)**.
- c. Jika saya tidak berupaya memperbaiki kesalahan input, data yang tersaji tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini menunjukkan saya kurang profesional dan tidak kompeten **(kompeten)**.

Kegiatan 2 : Mengidentifikasi data spreadsheet ke Google My Maps dengan import data otomatis

Tahapan kegiatan : Integrasi spreadsheet ke Google My Maps

- a. Jika saya tidak melakukan integrasi data secara otomatis dan tetap memilih cara manual, maka pekerjaan menjadi lebih lambat dan rawan kesalahan. Hal ini menunjukkan saya tidak berorientasi pada hasil kerja yang efektif dan efisien **(akuntabel)**.
- b. Jika saya tidak memahami langkah-langkah teknis impor data, maka saya akan kesulitan menghasilkan peta digital yang akurat. Kondisi ini mencerminkan bahwa saya tidak mengembangkan kapasitas diri dalam menguasai teknologi yang mendukung tugas **(kompeten)**.
- c. Jika saya tidak membagikan hasil peta digital secara kolaboratif kepada pihak yang relevan, maka pemanfaatan data menjadi terbatas. Ini berarti saya tidak menumbuhkan kerja sama

dan keterbukaan **(kolaboratif & harmonis)**.

Kegiatan 3 : Mengklasifikasikan daerah berdasarkan status prioritas kerawanan (Bahaya, Siaga, Waspada, Aman)

Tahapan kegiatan : Penentuan kategori dan penandaan titik lokasi pada peta digital

- a. Jika saya tidak melakukan klasifikasi status prioritas, maka informasi pada peta menjadi kurang jelas dan tidak membantu pembaca dalam memahami tingkat kerawanan tiap daerah. Hal ini menunjukkan saya tidak memberikan pelayanan terbaik yang berorientasi pada pengguna data **(berorientasi pelayanan)**.
- b. Jika saya tidak konsisten dalam memberikan kode warna atau status kerawanan, data menjadi membingungkan dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan saya tidak menjaga akurasi dan integritas data **(akuntabel)**.
- c. Jika saya tidak menyusun kategori dengan rapi sesuai hasil analisis, maka peta digital tidak akan berguna bagi pengambil kebijakan. Hal ini mencerminkan kurangnya kompetensi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas **(kompeten & loyal)**.

Keterkaitan Kegiatan Terhadap Visi, Misi dan Nilai Organisasi

Dalam kegiatan melakukan pengecekan data ganda, mengoreksi kesalahan input, serta memastikan kelengkapan data, kemudian mengintegrasikan data *spreadsheet* ke *Google My Maps* dengan fitur impor otomatis, hingga mengklasifikasikan daerah berdasarkan tingkat kerawanan narkoba (Bahaya, Siaga, Waspada, Aman), saya berupaya menjaga kualitas data agar lebih akurat, valid, dan mudah dipahami dalam bentuk visual. Kegiatan ini berkaitan erat dengan kedudukan dan peran ASN yang dituntut untuk bekerja secara akuntabel, kompeten, dan kolaboratif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan

berbasis data. Melalui kegiatan ini, saya berkontribusi pada pencapaian misi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, khususnya misi ketiga yaitu **“Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”**, serta misi kedua yaitu **“Meningkatkan Kewaspadaan Dini guna Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Tangkal Dini dalam mengantisipasi berbagai potensi ATHG dan Penanganan Konflik Sosial di bidang ipoleksosbudhankam”**. Hal ini tercermin dari upaya saya menghadirkan data yang rapi, valid, dan terklasifikasi dalam peta digital, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sarana monitoring daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar. Adapun nilai-nilai organisasi yang tercermin di dalam visi dan misi Badan Kesbangpol Tanah Datar yaitu **akuntabilitas, profesionalitas, integritas, efektif dan efisien, transparansi, konsistensi, serta membangun kepercayaan publik** yang saya terapkan dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga hasil aktualisasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pengolahan data internal, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

b. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Melakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan dari database (<i>Spreadsheet</i>).
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	1 s/d 2 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Laporan database secara berkala. 2. Notulen dan dokumentasi konsultasi dengan mentor.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan:	

1. Laporan database secara berkala

Kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan database *Form (spreadsheet)* secara berkala kepada mentor **(akuntabel)**. Database ini berisi data hasil pengisian form digital yang sudah disebarkan kepada responden atau masyarakat terkait titik-titik lokasi rawan narkoba. Data tersebut secara otomatis masuk ke dalam *spreadsheet* sehingga dapat dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu.

Pelaporan kepada mentor dilakukan dengan cara menyiapkan ringkasan data yang sudah terkumpul, kemudian menyampaikan hasil perkembangan tersebut secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **(harmonis & kolaboratif)**. Laporan disusun dalam bentuk *spreadsheet* yang mudah dibaca, sehingga mentor dapat melihat secara langsung jumlah data yang masuk, sebaran lokasi, maupun hal-hal penting lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut **(kompeten)**.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mentor selalu mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan data, sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data berjalan sesuai rencana. Dengan adanya laporan berkala, mentor juga dapat memberikan masukan atau arahan apabila ditemukan kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengumpulan maupun pengolahan data.

2. Notulen dan dokumentasi konsultasi dengan mentor

Melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal rencana kegiatan aktualisasi untuk memastikan tahapan, waktu pelaksanaan, serta rincian kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan realistis untuk dilaksanakan. Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung/koordinasi, dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor **(kolaboratif)**.

Analisa Dampak Apabila Tidak Diterapkan NDS dalam Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan 4 : Laporan database secara berkala kepada mentor

Tahapan kegiatan : Menyusun ringkasan data dari spreadsheet dan menyampaikannya secara rutin kepada mentor

- a. Apabila saya tidak menyajikan laporan secara terstruktur dan hanya mengirim data mentah tanpa ringkasan, maka mentor akan kesulitan memahami perkembangan data yang ada. **(kompeten)**, karena tidak berusaha memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami.
- b. Jika saya terlambat menyampaikan laporan, maka mentor tidak dapat segera memberikan masukan atau tindak lanjut. **(akuntabel)**, karena tidak disiplin dalam menjaga jadwal dan komitmen yang sudah disepakati.
- c. Bila laporan tidak dibagikan secara terbuka, hanya disimpan sendiri tanpa melibatkan mentor, **(kolaboratif)**, karena menutup akses informasi yang seharusnya dikerjakan bersama.

Kegiatan 5 : Notulen dan dokumentasi konsultasi dengan mentor

Tahapan kegiatan : Menyusun catatan hasil konsultasi untuk memastikan kejelasan rencana aktualisasi

- a. Jika saya tidak membuat notulen secara lengkap dan hanya mengandalkan ingatan, maka ada risiko terjadi salah tafsir terhadap arahan mentor. Hal ini berarti saya tidak mengimplementasikan nilai Akuntabel, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil konsultasi secara tertulis.
- b. Apabila saya tidak mendengarkan masukan mentor dengan sungguh-sungguh atau mengabaikan saran yang diberikan **(harmonis)**, sebab tidak menghargai pendapat orang

lain.

- c. Jika dokumentasi konsultasi tidak dibuat dan tidak dibagikan kepada pihak terkait, maka akan menyulitkan koordinasi ke depan (**kolaboratif**), karena tidak membangun kerja sama yang transparan dan saling mendukung.

Keterkaitan Kegiatan Terhadap Visi, Misi dan Nilai Organisasi

Dalam kegiatan melaporkan database secara berkala dan membuat notulen serta dokumentasi konsultasi dengan mentor, terdapat keterkaitan erat dengan **kedudukan dan peran ASN dalam Manajemen ASN**, dimana saya sebagai ASN bertanggung jawab untuk berkoordinasi, melaporkan, dan memastikan setiap tahapan aktualisasi berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Melalui kegiatan ini, mentor memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai perkembangan data titik rawan narkoba sekaligus memberikan kritik, saran, serta arahan perbaikan sehingga pelaksanaan aktualisasi lebih terarah dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, khususnya Kantor Badan Kesbangpol. Hal ini sejalan dengan misi Kesbangpol yaitu “**Meningkatkan kewaspadaan dini dalam deteksi, cegah, dan tangkal dini serta meningkatkan ketahanan sosial melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba**” karena laporan data yang teratur dan hasil konsultasi yang terdokumentasi akan mendukung langkah pencegahan narkoba secara lebih efektif. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, yaitu **akuntabilitas** melalui pertanggungjawaban pelaporan rutin, **profesionalitas** dan kompetensi dalam pengolahan serta penyajian data, integritas dengan menjaga kejujuran dan **konsistensi** informasi, efektivitas dan efisiensi melalui penyampaian data yang ringkas dan tepat waktu, transparansi melalui keterbukaan informasi kepada mentor, konsistensi dalam

pelaporan berkala, serta membangun kepercayaan dengan menjadikan proses aktualisasi terbuka dan dapat dipantau secara langsung.

Tabel 4.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK) :

No	Mata Pelatihan	Kegiatan												Jumlah Aktualisasi per MP	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5		Ke-6			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Berorientasi Pelayanan	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	3	2
2.	Akuntabel	1	2	3	2	1	2	1	2	2	2	1	1	9	13
3.	Kompeten	1	1	1	0	2	4	1	1	3	3	0	1	8	9
4.	Harmonis	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	1	1	3	10
5.	Loyal	0	0	2	0	0	1	0	1	1	2	2	0	5	4
6.	Adaptif	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	1	0	3	5
7.	Kolaboratif	0	1	0	2	0	2	1	1	0	2	1	2	2	9
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan		3	5	7	8	5	13	4	10	7	11	7	5	33	52

Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Rencana Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK)

D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
Kondisi yang terjadi sebelum aktualisasi adalah salah satu misi dari Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar adalah belum adanya pemetaan daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar yang dapat dijadikan acuan bersama oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Selama ini informasi mengenai titik-titik rawan narkoba hanya diperoleh secara parsial melalui laporan manual, kegiatan penyelidikan terbatas, atau catatan dari instansi terkait. Hal ini menyebabkan data yang ada tidak terintegrasi, sulit diakses secara cepat, serta belum mampu menggambarkan tingkat kerawanan di suatu wilayah secara jelas. Selain itu, belum adanya sistem pelaporan yang partisipatif dari masyarakat	Kondisi yang terjadi setelah aktualisasi adalah pemetaan daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar dapat diwujudkan melalui inovasi berbasis data dan teknologi dengan memanfaatkan <i>Google My Maps</i> yang terintegrasi dengan <i>Google Form</i> (Form Pelaporan Cepat). Data yang dikumpulkan dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah, tenaga kesehatan, pendidikan, serta laporan masyarakat kini dapat divisualisasikan secara interaktif dalam bentuk peta digital. Peta tersebut menampilkan titik-titik rawan narkoba dengan kategori kerawanan bahaya, siaga, waspada, dan aman menggunakan simbol dan warna berbeda, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Masyarakat juga telah difasilitasi dengan Form Pelaporan Cepat secara online,

menjadikan potensi informasi lapangan tidak terhimpun dengan baik. Masyarakat yang mengetahui aktivitas mencurigakan atau indikasi penyalahgunaan narkoba tidak memiliki media yang mudah untuk melaporkannya. Akibatnya, respon terhadap potensi peredaran narkoba cenderung lambat karena keterbatasan data dan informasi yang valid. Kondisi ini menunjukkan bahwa misi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kewaspadaan dini melalui deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba belum dapat terwujud secara optimal.	sehingga mereka dapat langsung melaporkan aktivitas mencurigakan hanya dengan mengisi data lokasi, kronologi singkat, serta bukti pendukung. Laporan yang masuk otomatis tersimpan dalam database dan dapat ditampilkan pada peta setelah melalui proses verifikasi, sehingga data menjadi lebih akurat dan <i>up to date</i>. Dengan adanya inovasi ini, informasi mengenai daerah rawan narkoba tidak lagi bersifat parsial dan manual, tetapi terintegrasi, partisipatif, dan transparan. Hal ini mendukung terwujudnya misi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, yaitu “Meningkatkan Kewaspadaan Dini Guna Deteksi Dini dan Pencegahan Dini, serta Memperkuat Ketahanan Sosial dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Daerah”.
--	--

Tabel 4.4 Matrik Capaian Penyelesaian Core Isu

E. Manfaat terselesaikannya Core Isu

Dengan terselesaikannya core isu, memberi manfaat kepada berbagai pihak seperti:

1. Bagi Individu Peserta

- Meningkatkan kompetensi teknis dalam pengolahan data digital, pemetaan berbasis teknologi, dan pengelolaan informasi partisipatif.
- Memberikan pengalaman nyata dalam memadukan teori yang diperoleh selama Latsar CPNS dengan praktik di lapangan.
- Menumbuhkan nilai akuntabilitas, profesionalitas, dan kolaborasi melalui keterlibatan langsung dengan mentor serta koordinasi lintas pihak.

2. Bagi Instansi/Organisasi (Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar)

- Memiliki sistem pemetaan daerah rawan narkoba yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berbasis teknologi.
- Mendukung pencapaian visi dan misi Kesbangpol, khususnya dalam meningkatkan kewaspadaan dini (deteksi dini, cegah dini, tangkal dini).
- Menyediakan data yang lebih akurat dan transparan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun langkah pencegahan narkoba.

3. Bagi OPD Terkait (BNNK, Polres, Satnarkoba, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll.)

- Mendapatkan akses informasi yang lebih jelas mengenai sebaran titik rawan narkoba di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

- Memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan masalah narkoba melalui data bersama yang dapat dipantau secara real time.
- Meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberantasan narkoba karena memiliki dasar informasi yang valid dan terintegrasi.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Setelah mengikuti Latsar CPNS di tempat kerja dan untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi ini, maka akan diadakan beberapa kegiatan yang dirancang dengan matrik sebagai berikut :

No	Kegiatan	Output	Durasi & Waktu	Para pihak yang terlibat	Sumber Biaya	Ket.
1	Membuat usulan pengajuan penyediaan kapasitas penyimpanan <i>Google My Maps</i> yang berbayar di anggaran tahun berikutnya	Tersedianya kapasitas penyimpanan <i>Google My Maps</i> yang berbayar	1 Bulan	Kepala Badan Kesbangpol, Kabid Kesatuan Bangsa, Kasubbag perencanaan dan keuangan	Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar	
2	Membuat akun <i>Google Drive</i> cadangan untuk antisipasi jika kapasitas penyimpanan di akun <i>Google Drive</i>	Tersedianya akun <i>Google Drive</i> cadangan	1 Minggu	Kabid Kesatuan Bangsa dan rekan kerja di bidang kesatuan bangsa	-	

	sebelumnya sudah penuh					
3	Membuat usulan pengajuan penyediaan kapasitas penyimpanan <i>Google Drive</i> yang berbayar di anggaran tahun berikutnya	Tersedianya kapasitas penyimpanan <i>Google Drive</i> yang berbayar	1 Bulan	Kepala Badan Kesbangpol, Kabid Kesatuan Bangsa, Kasubbag perencanaan dan keuangan	Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar	

Tabel 4.5 Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Aktualisasi/ Habitulasi Mata Pelatihan

Kegiatan 1:

Pada tahapan kegiatan aktualisasi ini, penerapan nilai **BerAKHLAK** menjadi pedoman dalam setiap langkah yang dilakukan. Nilai **Berorientasi pelayanan** tercermin dari sikap ramah, sopan, serta selalu mengawali salam dan ucapan terima kasih ketika berinteraksi dengan mentor. Nilai **Akuntabel** diwujudkan dengan menyusun jadwal kegiatan secara cermat dan disiplin, menyiapkan surat izin konsultasi sesuai ketentuan administrasi, serta bertanggung jawab mencatat setiap arahan mentor dalam lembar konsultasi. Nilai **Kompeten** terlihat dari kemampuan menyusun jadwal yang terukur, menyusun surat dengan format yang tepat, serta melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan baik setelah mendapatkan arahan. Nilai **Harmonis** ditunjukkan melalui sikap menghargai masukan mentor, menyetujui jadwal konsultasi yang disepakati bersama, dan menjaga komunikasi yang baik baik dalam forum resmi maupun keseharian. Sedangkan nilai **Loyal** dikuatkan dengan sikap profesional, salah satunya dengan menggunakan pakaian dinas lengkap saat konsultasi sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dinas.

Kegiatan 2:

Pada tahapan kegiatan aktualisasi ini, nilai BerAKHLAK diterapkan dalam setiap proses. Nilai **Berorientasi Pelayanan** tercermin dari sikap sopan, ramah, serta profesional saat menyampaikan maksud dan tujuan kepada mentor baik secara

langsung maupun melalui media komunikasi seperti *WhatsApp*. Nilai **Akuntabel** diwujudkan dengan kesungguhan dalam mengelola data manual Excel hingga menjadi peta digital yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan disiplin melakukan konsultasi dan mencatat saran dari mentor. Nilai **Kompeten** tampak dari kemampuan menyesuaikan format data, memanfaatkan teknologi *Google My Maps*, serta membuat draft peta digital yang informatif dan mudah dipahami. Nilai **Harmonis** ditunjukkan melalui sikap menghargai setiap arahan mentor dan menjaga komunikasi yang baik, baik dalam diskusi tatap muka maupun melalui pesan. Nilai **Adaptif** dikuatkan dengan upaya menyesuaikan teknologi digital dalam mengolah data agar lebih relevan dan bermanfaat. Nilai **Kolaboratif** tercermin dari keterbukaan menerima masukan mentor serta kerja sama dalam menyempurnakan hasil visualisasi peta digital. Sedangkan nilai **Loyal** diwujudkan dengan menjaga etika kedinasan, termasuk menggunakan pakaian dinas lengkap saat melakukan konsultasi, sehingga mencerminkan kepatuhan dan dedikasi terhadap instansi.

Kegiatan 3:

Pada pelaksanaan kegiatan ini diterapkan nilai BerAKHLAK dalam setiap tahapan. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui inovasi pembuatan Form Pelaporan Cepat “SIGAP” dan *QR Code* yang sederhana, mudah dipahami, serta ramah pengguna sehingga memudahkan masyarakat dalam melaporkan titik rawan narkoba. Nilai **Akuntabel** tercermin dari ketelitian dalam merancang form, menguji *QR Code* pada berbagai perangkat, serta memastikan link berfungsi optimal tanpa kendala teknis. Nilai **Kompeten** terlihat dari

kemampuan mendesain form, mengolah *QR Code* dengan tampilan komunikatif, hingga melakukan uji coba bersama rekan kerja dan mentor untuk menjamin kualitas hasil. Nilai **Harmonis** tampak pada sikap menghargai masukan mentor dan rekan kerja selama proses konsultasi serta kerja sama dalam menyempurnakan desain sebelum dipublikasikan. Nilai **Kolaboratif** ditunjukkan dengan keterlibatan mentor dan rekan kerja dalam proses uji coba dan evaluasi sehingga hasil lebih terarah. Nilai **Adaptif** diwujudkan dengan pemanfaatan berbagai platform digital seperti *Google Form*, *Canva*, hingga media sosial instansi untuk publikasi layanan. Sedangkan nilai **Loyal** dikuatkan melalui konsistensi mendukung instansi dengan menyebarkan pamflet *QR Code* melalui website resmi dan media sosial, sehingga layanan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan mendukung tugas pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan 4:

Pada pelaksanaan kegiatan ini diterapkan nilai BerAKHLAK yaitu **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui penyusunan materi sosialisasi dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami sehingga peserta dapat mengerti manfaat penggunaan peta digital serta form pelaporan secara praktis. Nilai **Akuntabel** tampak pada ketelitian dalam menyiapkan konsep surat undangan, memeriksa format serta isi surat sesuai tata administrasi, dan memastikan materi sosialisasi yang dibuat benar-benar relevan dengan kebutuhan instansi. Nilai **Kompeten** tercermin dari kemampuan menyusun materi digital yang memadukan informasi, visualisasi peta, serta penguasaan teknologi sehingga

dapat mendukung efektivitas kerja instansi. Nilai **Harmonis** diwujudkan melalui sikap terbuka menerima arahan dan koreksi dari mentor serta menyampaikan materi dengan ramah, sopan, dan mudah diterima oleh seluruh peserta. Nilai **Adaptif** terlihat dari pemanfaatan teknologi digital seperti *Google My Maps* dan form pelaporan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Nilai **Kolaboratif** diwujudkan dalam pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan peserta secara interaktif melalui sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Sedangkan nilai **Loyal** tampak dari komitmen dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi secara profesional, menggunakan identitas kedinasan yang lengkap, serta memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui dukungan inovasi digital.

Kegiatan 5:

Pada pelaksanaan kegiatan ini diterapkan nilai BerAKHLAK secara konsisten. Nilai **Akuntabel** tercermin dalam ketelitian melakukan pengecekan data ganda, mengoreksi kesalahan input, serta memastikan kelengkapan data agar hasil analisis valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai **Kompeten** diwujudkan melalui kemampuan mengintegrasikan data spreadsheet ke *Google My Maps* dengan import otomatis, sehingga data yang semula berbentuk tabel dapat divisualisasikan menjadi peta digital yang lebih mudah dipahami. Nilai Harmonis dan **Kolaboratif** tampak dari koordinasi dengan rekan kerja maupun mentor saat menemukan ketidaksesuaian data serta dalam pelaksanaan uji coba sistem agar hasil yang diperoleh sesuai kebutuhan bersama. Nilai **Berorientasi Pelayanan** ditunjukkan melalui penyusunan klasifikasi daerah berdasarkan tingkat

kerawanan (Bahaya, Siaga, Waspada, Aman) yang dilengkapi kode warna, sehingga informasi lebih jelas, praktis, dan mudah dipahami oleh pengguna. Sedangkan nilai **Loyal** diwujudkan melalui tanggung jawab menjaga kualitas data dan komitmen dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menyediakan peta digital yang informatif dan bermanfaat bagi instansi serta masyarakat.

Kegiatan 6:

Pada kegiatan pelaporan database secara berkala dan konsultasi dengan mentor, nilai BerAKHLAK diterapkan secara menyeluruh. Nilai **Akuntabel** tampak melalui ketelitian dalam menyusun laporan database berbasis spreadsheet yang rapi, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disiplin melaporkannya sesuai jadwal yang ditetapkan. Nilai **Kompeten** diwujudkan dengan kemampuan menyajikan ringkasan data yang mudah dipahami sehingga memudahkan mentor dalam memantau perkembangan informasi dan memberikan arahan perbaikan. Nilai **Harmonis** dan **Kolaboratif** terlihat dari koordinasi dan diskusi langsung dengan mentor, baik dalam penyampaian laporan maupun penyusunan jadwal kegiatan, sehingga tercipta kerja sama yang baik dan saling menghargai. Nilai **Berorientasi Pelayanan** dikuatkan dengan sikap ramah, sopan, dan terbuka dalam setiap proses komunikasi, sehingga informasi yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk mendukung kelancaran aktualisasi. Sedangkan nilai **Loyal** ditunjukkan dengan konsistensi menjaga tata krama kedinasan, termasuk penggunaan pakaian dinas lengkap saat melakukan konsultasi, sebagai wujud kesetiaan terhadap aturan dan profesionalisme ASN.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Dengan adanya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tanah Datar, pendataan daerah rawan narkoba dengan menggunakan *Google Form* dan *Google My Maps* meningkatkan kewaspadaan dini dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya. Inovasi ini sekaligus mendukung peran pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan
2. Mengidentifikasi data awal (lokasi rawan narkoba, data BNN, aparat, masyarakat).
3. Membuatkan Form Pelaporan Cepat (Google Form) "SIGAP" yang bisa diisi oleh masyarakat/relawan untuk melaporkan titik rawan.
4. Mengolah data dari Spreadshet ke Google My Maps.
5. Mengadakan sosialisasi terkait Digitalisasi Pemetaan Daerah Narkoba ke instansi Badan Kesbangpol, BNNK, Polres & Satnarkoba, serta Instansi terkait lainnya.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan dari database.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Capaian hasil penyelesaian *core* isu sesudah aktualisasi sudah adanya upaya pemetaan daerah rawan narkoba melalui inovasi digital berbasis data dan teknologi di Kabupaten Tanah Datar. Dengan pemanfaatan Google My Maps yang terintegrasi dengan Google Form (Form Pelaporan Cepat), data dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah, tenaga kesehatan, pendidikan, serta laporan masyarakat dapat divisualisasikan secara interaktif dalam bentuk peta digital. Peta ini menampilkan titik rawan narkoba dengan kategori bahaya, siaga, waspada, maupun aman menggunakan simbol dan warna berbeda, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak.

Selain itu, masyarakat juga telah difasilitasi untuk melaporkan aktivitas mencurigakan secara online melalui Form Pelaporan Cepat, dimana laporan yang masuk tersimpan otomatis dalam database dan ditampilkan di peta setelah diverifikasi. Dengan adanya inovasi ini, informasi mengenai daerah rawan narkoba tidak lagi parsial dan manual, tetapi terintegrasi, partisipatif, dan transparan. Hal ini memudahkan berbagai pihak dalam melakukan kewaspadaan dini sekaligus mendukung misi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan deteksi dini, pencegahan dini, serta memperkuat ketahanan sosial dalam upaya pemberantasan narkoba di daerah.

B. REKOMENDASI

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Untuk penyelenggara pelatihan yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, pelatihan telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peserta. Ke depan diharapkan kualitas pelatihan tetap dipertahankan serta ditingkatkan, khususnya dengan menambahkan materi praktik penggunaan teknologi digital dalam mendukung program pemerintahan daerah.

2. Untuk Instansi Asal Peserta

Untuk instansi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, diharapkan agar pemetaan daerah rawan narkoba berbasis digital melalui *Google My Maps* dan Form Pelaporan Cepat terus dioptimalkan serta dikembangkan. Inovasi ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dini, memperkuat deteksi dan pencegahan dini, serta mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sistem terintegrasi ini juga sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba). Jakarta: BNN RI.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tanah Datar: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jakarta: Kemenpan RB.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2021). Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar: Pemkab Tanah Datar.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tanah Datar: Pemkab Tanah Datar.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Jakarta: Sekretariat Negara.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi. (2025). Panduan Laporan Aktualisasi Latsar CPNS Tahun 2025. Bukittinggi: PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi.

Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Tanah Datar dalam Angka 2024. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia & Badan Narkotika Nasional. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022. Jakarta: BNN dan LIPI.

LAMPIRAN

Lampiran Kegiatan 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualissi

Judul Kegiatan	Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	1 s/d 2 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Jadwal rencana kegiatan aktualisasi. 2. Surat izin pelaksanaan aktualisasi. 3. Dokumentasi konsultasi dengan mentor.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Membuat jadwal rencana kegiatan aktualisasi Pada minggu pertama kegiatan aktualisasi Latsar CPNS Tahun 2025, focus utama saya adalah menyiapkan bahan dan jadwal konsultasi dengan mentor untuk satu bulan ke depan. Mulai dari menyusun jadwal rencana kegiatan aktualisasi yang memuat tahapan, waktu pelaksanaan, serta rincian kegiatan yang akan dilakukan selama masa aktualisasi (akuntabel). Penyusunan jadwal ini bertujuan agar kegiatan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (kompeten). 2. Membuat surat izin konsultasi Membuat surat izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi Latsar sebagai bentuk administrasi resmi yang ditujukan kepada mentor (atasan langsung) agar kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan (akuntabel). Kegiatan ini meliputi penyusunan konsep surat, menyesuaikan format dengan aturan tata administrasi, melakukan pengecekan redaksi dan kelengkapan isi, serta menyampaikan kepada mentor untuk mendapat persetujuan (harmonis). Pengecekan redaksi surat tersebut, dilakukan oleh mentor dengan memberikan arahan dan koreksi terhadap beberapa bagian surat agar lebih rapi, jelas, serta sesuai prosedur.	

Dengan demikian, saya selaku peserta latsar CPNS memperoleh pemahaman praktis tentang penyusunan surat dinas sekaligus memastikan dokumen yang digunakan dalam kegiatan latsar memiliki keabsahan dan ketepatan secara formal.

3. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal rencana

Melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal rencana kegiatan aktualisasi untuk memastikan tahapan, waktu pelaksanaan, serta rincian kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan realistis untuk dilaksanakan. Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor **(kolaboratif)**.

1.

RENCANA KEGIATAN

Tabel 4.1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi di Kantor Badan Kestibangan Kabupaten Tawari Darat dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SEPTEMBER					OKTOBER				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan 1 (7-10/9 September 2021) Unduh dan konsulasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi persiapan dilakukan										
2	Kegiatan 2 (11 September 2021) Mengidentifikasi Area and Lokasi (dari rekam jejak, data IPH, apud, masyarakat)										
3	Kegiatan 3 (12-13 September 2021) Identifikasi Form Pelaporan Cepat (Google Form) "SIGAP" yang bisa diunduh (masyarakat) melalui untuk melaporkan ISK sesuai										
4	Kegiatan 4 (14-20/9 September 2021) Menginput data dan Spreadsheet by Google My Maps										

2.



2.



3.



Lampiran Kegiatan 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1

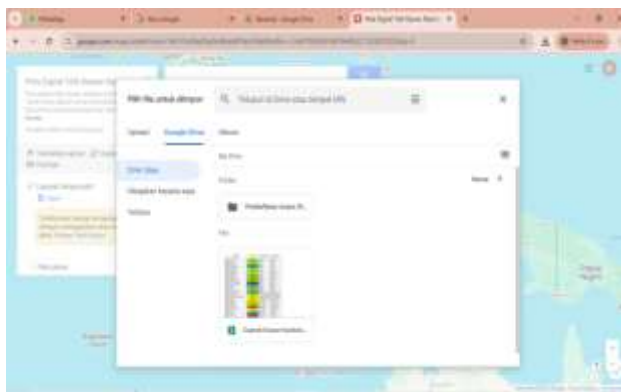
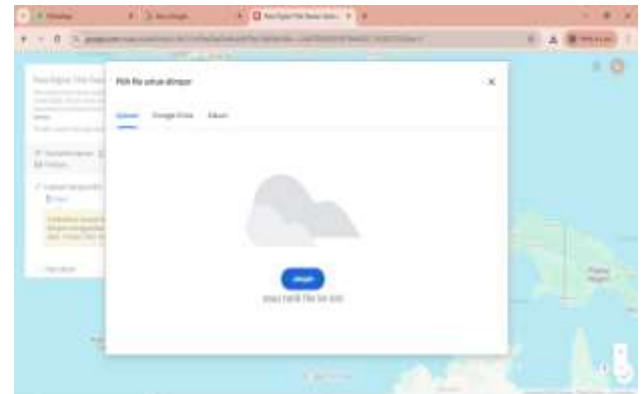
a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Mengidentifikasi data awal lokasi rawan narkoba (data BNN, aparat, masyarakat)
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	3 s/d 4 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Data manual dalam bentuk <i>Excel</i> . 2. Draft awal peta digital daerah rawan narkoba. 3. Notulen dan dokumentasi hasil konsultasi.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Data manual dalam bentuk <i>Excel</i> Kegiatan aktualisasi Latsar (<i>Off campus</i>) dilaksanakan di OPD masing-masing, sehingga saya berkomunikasi langsung dengan mentor di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (akuntabel). Saya menyampaikan maksud dan tujuan secara sopan dan profesional untuk memperoleh data manual terkait daerah rawan narkoba di Kabupaten Tanah Datar. Namun saya tidak hanya menyampaikan secara lisan, saya juga menghubungi mentor melalui Whatsapp terkait permintaan data tersebut. (harmonis). Data tersebut masih disimpan dalam bentuk <i>Excel</i> yang menjadi rujukan awal sebelum dilakukan proses digitalisasi ke dalam peta berbasis <i>Google My Maps</i>. (adaptif). Melalui komunikasi ini peserta mendapatkan arahan dan dukungan dari mentor untuk menggunakan data tersebut sebagai bahan pengolahan dan analisis. (kolaboratif). 2. Draft awal peta digital daerah rawan narkoba a. Menyesuaikan format file <i>excel</i> agar kompatibel dengan <i>Google My Maps</i>, termasuk kolom nama wilayah, kategori kerawanan, dan koordinat geografis. b. Membuat akun <i>Google</i> baru khusus pendataan daerah rawan narkoba Kabupaten Tanah Datar.	

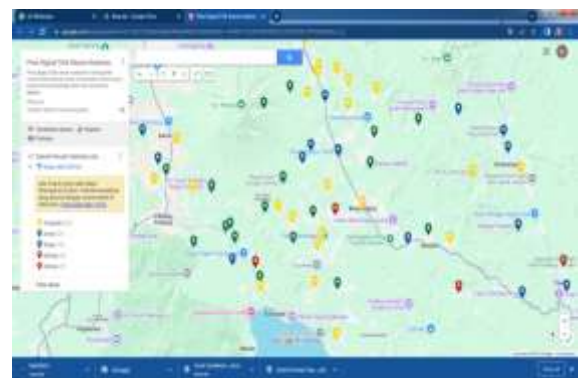
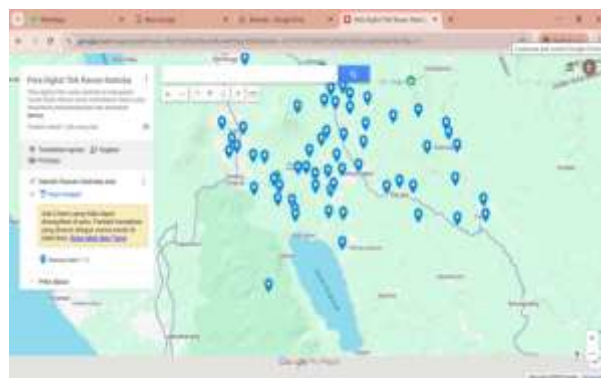
- c. Masuk ke akun *Google*, membuka layanan *Google My Maps*, dan membuat peta baru sebagai wadah untuk menampilkan data.
- d. Mengunggah file *Excel* ke *Google My Maps* dengan fitur “Import”, memilih kolom yang akan digunakan sebagai penanda lokasi **(adaptif)**.
- e. Menyesuaikan ikon, warna, dan label pada peta sesuai kategori data (tingkat kerawanan: bahaya, siaga, waspada, dan aman) untuk memudahkan pembacaan visual.

3. Notulen dan dokumentasi hasil konsultasi

Setelah menyelesaikan lima tahapan kegiatan diatas, dihari berikutnya saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait draft awal peta digital daerah rawan narkoba untuk meminta masukan dan saran terhadap hasil visualisasi data yang telah dibuat. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peta yang ditampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan analisis, mudah dipahami, serta sesuai dengan standar informasi yang dibutuhkan oleh instansi **(akuntabel)**. Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor **(harmonis & kolaboratif)**.



e.



3.



Lampiran kegiatan 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Membuatkan Form Pelaporan Cepat (<i>Google Form</i>) “SIGAP” dan QR Code Form, serta yang bisa diisi oleh masyarakat/relawan untuk melaporkan titik rawan
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	8 s/d 12 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Draft Desain Form Pelaporan Cepat. 2. Desain QR Code Form. 3. Uji coba, notulen dan dokumentasi hasil konsultasi. 4. Unggahan pamflet QR Code di sosmed & website instansi.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Mendesain Form Pelaporan Cepat “SIGAP” dengan format sederhana: identitas pelapor (opsional), lokasi titik rawan, deskripsi singkat, dan bukti foto pendukung Sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, peserta Latsar membuat sebuah formulir digital bernama “SIGAP” (Sistem Informasi Geospasial Anti Narkoba Partisipatif) menggunakan platform <i>Google Form</i> (kompeten). Saya membuat form dengan desain sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Serta menambahkan penjelasan singkat tentang tujuan form di bagian atas. 2. Mendesain QR Code Form Setelah <i>Google Form</i> “SIGAP” selesai dibuat dan semua pertanyaan telah disusun dengan lengkap, saya melanjutkan proses pembuatan QR Code sebagai media akses cepat menuju form tersebut. Saya menggunakan platform pembuat QR Code gratis yang tersedia secara online yaitu <i>qr-code-generator.com</i>, untuk menghasilkan QR Code yang terhubung langsung ke tautan <i>Google Form</i> (kompeten). Setelah QR Code berhasil dibuat, saya juga melakukan tahap desain agar tampilannya	

lebih menarik dan komunikatif. Untuk keperluan ini, saya memanfaatkan platform desain grafis canva yang memungkinkan saya untuk menambahkan berbagai elemen visual seperti judul, ikon, warna, dan keterangan singkat pada QR Code tersebut **(adaptif)**. Desain ini saya buat dengan tujuan agar QR Code tidak hanya sekadar berfungsi sebagai penghubung tautan, tetapi juga dapat menarik perhatian masyarakat atau relawan yang melihatnya, serta memberikan informasi yang jelas tentang fungsi QR Code tersebut.

3. Melakukan uji coba bersama rekan kerja di Kesbangpol dan melakukan konsultasi dengan mentor

Melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain form dan QR Code peta digital daerah rawan narkoba untuk meminta masukan dan validasi terhadap hasil visualisasi desain form dan QR Code yang telah dibuat. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peta yang ditampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan analisis, mudah dipahami, serta sesuai dengan standar informasi yang dibutuhkan oleh instansi **(akuntabel)**. Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor **(harmonis & kolaboratif)**.

Saya melakukan uji coba pemindaian QR Code yang telah dibuat menggunakan beberapa perangkat ponsel dengan sistem operasi berbeda, seperti Android dan iOS, guna memastikan fungsi QR Code berjalan optimal dan dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna **(kompeten)**. Proses uji coba meliputi pemindaian QR Code menggunakan aplikasi kamera bawaan serta aplikasi pemindai QR Code pihak ketiga untuk memastikan kompatibilitas yang luas. Setelah QR Code dipindai, saya mengecek apakah tautan secara otomatis terbuka dan langsung mengarahkan pengguna ke Google Form **“SIGAP”** tanpa kendala teknis seperti link error, loading lama, atau halaman yang tidak ditemukan.

(akuntabel).

Kemudian dilakukan pula uji coba QR Code dan pengisian form oleh rekan kerja dan mentor untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik **(harmonis & kolaboratif)**. Uji coba ini penting agar dapat diketahui apakah QR Code dapat diakses dengan mudah, form dapat diisi tanpa kendala, dan data yang masuk sesuai dengan kebutuhan analisis. Dari hasil uji coba ini diperoleh masukan tambahan untuk penyempurnaan desain sebelum dipublikasikan secara lebih luas **(kompeten)**.

4. Melakukan Pamflet QR Code melalui website & media sosial instansi.

Kemudian saya melakukan publikasi pamflet digital berisi QR Code link form melalui website dan media sosial instansi **(adaptif)**. Publikasi ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan dan informasi tanpa harus mencari secara manual, sehingga akses menjadi lebih cepat dan praktis **(loyal)**.

Desain pamflet di Canva



3. a. Tampilan Form di Iphone

b. Tampilan Form di Andro

c. Uji coba form dan konsultasi ke mentor dan rekan kerja bidang Kesatuan Bangsa



4. Unggahan Pamflet Website Instansi



Sosmed (Instagram): kesbangpol_tanahdatar



Lampiran kegiatan 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Mengadakan konsultasi terkait Digitalisasi Pemetaan Daerah Rawan Narkoba ke instansi Badan Kesbangpol, BNNK Kota Payakumbuh, Polres Tanah Datar dan Padang Panjang, serta OPD terkait lainnya.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	15 s/d 19 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Konsep surat undangan. 2. Surat undangan sesuai format. 3. Materi konsultasi 4. Dokumentasi kegiatan.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 2. Mengkonsepkan surat undangan untuk kegiatan tersebut Sebelum dilaksanakannya kegiatan konsultasi tersebut, saya menyiapkan format surat untuk kegiatan sosialisasi sebagai bentuk administrasi (akuntabel). Kegiatan ini meliputi penyusunan konsep surat, menyesuaikan format dengan aturan tata administrasi, melakukan pengecekan redaksi dan kelengkapan isi, serta menyampaikan kepada mentor untuk mendapat persetujuan (harmonis). 3. Melakukan pengecekan format dan isi surat mentor Pengecekan redaksi surat tersebut, dilakukan oleh mentor dengan memberikan arahan dan koreksi terhadap beberapa bagian surat agar lebih rapi, jelas, serta sesuai prosedur. Dengan demikian, saya selaku peserta latsar CPNS memperoleh pemahaman praktis tentang penyusunan surat dinas sekaligus memastikan dokumen yang digunakan dalam kegiatan latsar memiliki keabsahan dan ketepatan secara formal. 4. Menyiapkan materi sosialisasi (manfaat penggunaan peta digital, form pelaporan, tampilan titik rawan di <i>Google My Maps</i>.)	

Saya menyiapkan materi sosialisasi terkait pemanfaatan peta digital. Pada tahap awal, saya terlebih dahulu mengumpulkan berbagai informasi dan referensi yang relevan mengenai manfaat penggunaan peta digital dalam mendukung tugas instansi, khususnya dalam pemetaan titik rawan narkoba.

Saya mulai menyusun materi yang mudah dipahami oleh peserta sosialisasi **(berorientasi pelayanan)**. Saya menggunakan bahasa sederhana agar seluruh pihak, baik dari kalangan pegawai maupun mitra kerja, dapat mengerti dengan jelas apa manfaat penggunaan peta digital **(harmonis)**. Saya menambahkan penjelasan tentang bagaimana form pelaporan dapat digunakan sebagai alat input data secara cepat dan praktis. Form ini dirancang agar masyarakat atau relawan bisa langsung melaporkan titik lokasi rawan, misalnya tempat nongkrong, kos-kosan mahasiswa, maupun tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi area rawan narkoba. Dalam materi yang saya siapkan, saya juga menampilkan contoh visual berupa tampilan titik-titik rawan yang sudah dimasukkan ke dalam *Google My Maps*. Dengan tampilan tersebut, saya berharap peserta sosialisasi bisa melihat secara nyata bagaimana data dari form pelaporan akan langsung terhubung dan divisualisasikan dalam bentuk peta digital **(adaptif)**. Hal ini penting agar peserta tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga menyadari bahwa sistem ini praktis dan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari **(akuntabel & kompeten)**.

Saya menyusun materi sosialisasi ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa percaya diri. Bagi saya, kegiatan ini bukan hanya sekadar menyiapkan bahan presentasi, melainkan juga menjadi sarana pembelajaran untuk mengasah kemampuan komunikasi, penyusunan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tugas kedinasan. Dengan adanya materi sosialisasi yang saya buat, saya berharap dapat memberikan kontribusi

nyata terhadap peningkatan efektivitas kerja instansi, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah **(loyal)**.

4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Setelah menyiapkan materi, saya melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pemanfaatan peta digital dalam mendukung pemetaan titik rawan narkoba. Dalam kegiatan ini, saya berperan sebagai penyaji yang menjelaskan secara langsung kepada peserta tentang manfaat penggunaan peta digital, cara mengisi form pelaporan, serta bagaimana data yang masuk akan otomatis ditampilkan dalam *Google My Maps*. Saya berusaha menyampaikan materi dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua peserta **(harmonis)**.

Selama pelaksanaan, saya menunjukkan contoh tampilan peta digital yang sudah berisi titik lokasi rawan. Dengan cara ini, peserta dapat melihat secara nyata hasil dari proses penginputan data ke dalam form pelaporan. Saya juga membuka sesi tanya jawab agar peserta lebih interaktif dan dapat memahami secara mendalam manfaat dari sistem ini. Selain itu, saya menekankan bahwa teknologi digital ini bukan hanya membantu instansi dalam bekerja lebih efektif, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba **(kolaboratif)**.

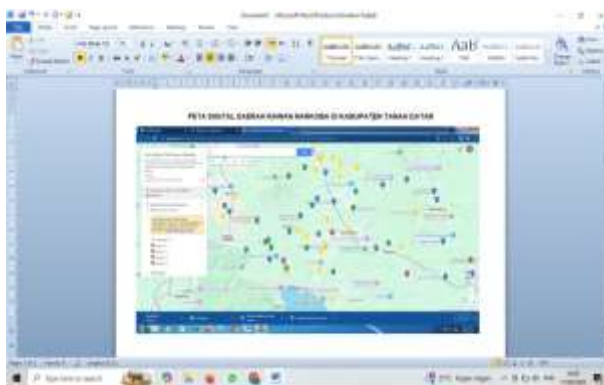
1.



2.



3.



4.





Lampiran kegiatan 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4.

b. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Mengolah data dan mengintegrasikan dari <i>Spreadsheet</i> ke <i>Google My Maps</i>
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	22 s/d 30 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. <i>Spreadsheet</i> terstruktur. 2. Titik rawan hasil form masyarakat muncul di <i>Google My Maps</i>. 3. Peta rawan terklasifikasi dengan kode warna berdasarkan tingkat kerawanan.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Melakukan pengecekan data ganda, mengoreksi kesalahan input, dan memastikan kelengkapan data Pada minggu terakhir ini, saya melakukan beberapa langkah penting dalam pengolahan data. Saya melakukan pengecekan data untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi yang telah dihimpun. Proses ini meliputi identifikasi adanya data ganda, mengoreksi kesalahan input, serta memverifikasi kelengkapan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Kegiatan ini dilakukan dengan teliti dan sistematis untuk meminimalisir potensi kesalahan yang dapat memengaruhi hasil laporan (akuntabel). Pengecekan data juga melibatkan koordinasi dengan rekan kerja maupun mentor apabila ditemukan ketidaksesuaian, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan dengan tepat (kolaboratif). Melalui kegiatan ini diharapkan data yang tersimpan menjadi lebih valid, rapi, dan siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (kompeten). Kegiatan ini membantu agar data yang digunakan lebih rapi, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, juga melatih ketelitian dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas (akuntabel & loyal).	

2. Mengidentifikasi data spreadsheet ke Google My Maps dengan import data otomatis

Pada tahapan ini, saya melakukan kegiatan mengintegrasikan data *spreadsheet* ke *Google My Maps*. Data yang sudah saya kumpulkan melalui form digital otomatis tersimpan di *spreadsheet*. Selanjutnya, saya mencoba menghubungkan *spreadsheet* tersebut ke *Google My Maps* dengan fitur import data otomatis. Dengan cara ini, setiap titik lokasi yang ada di dalam *spreadsheet* bisa langsung muncul di peta tanpa harus saya masukkan satu per satu secara manual (**akuntabel**).

Proses integrasi ini saya lakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, saya menyiapkan *spreadsheet* yang berisi daftar titik lokasi kerawanan narkoba beserta keterangan tambahan seperti alamat atau kategori lokasi. Kedua, saya membuka *Google My Maps* dan memilih fitur impor data. Setelah itu, saya menghubungkan *spreadsheet* yang sudah dibuat sebelumnya. Dari hasil impor tersebut, titik-titik lokasi langsung tampil di peta *Google My Maps* dengan ikon penanda (marker) (**kompeten**). Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat data lebih mudah dipahami dalam bentuk visual. Jika sebelumnya data hanya berupa tabel, kini informasi bisa dilihat dalam bentuk peta digital sehingga lebih jelas letak dan sebarannya. Hal ini tentu membantu dalam proses analisis dan monitoring, khususnya untuk melihat pola daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba (**harmonis & kolaboratif**).

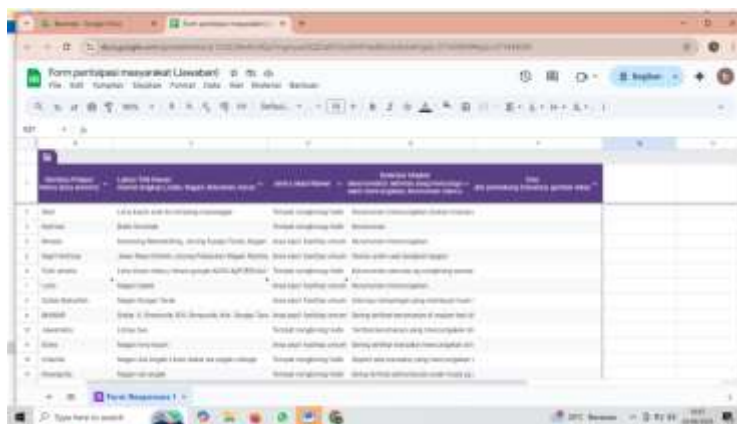
3. Mengkasifikasikan daerah berdasarkan status prioritas kerawanan (Bahaya, Siaga, Waspada, Aman).

Kemudian saya mulai menyusun klasifikasi daerah dengan membaginya ke dalam empat kategori, yaitu: Bahaya, Siaga, Waspada, dan Aman. Kategori ini saya buat agar memudahkan dalam membaca tingkat kerawanan narkoba di setiap lokasi (**akuntabel**).

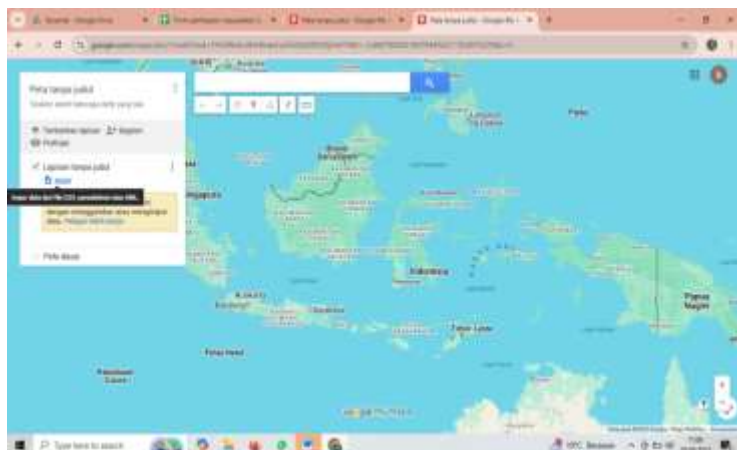
- Bahaya dengan kode warna merah, saya gunakan untuk daerah yang sering ditemukan kasus penyalahgunaan atau peredaran narkoba.
- Waspada dengan kode warna kuning, saya berikan untuk daerah yang pernah ada kasus, meskipun tidak terlalu sering, namun tetap berpotensi tinggi.
- Siaga dengan kode warna biru, saya berikan untuk daerah yang memiliki indikasi rawan, meskipun kasus yang ditemukan sedikit.
- Aman dengan kode warna hijau, saya berikan untuk daerah yang cenderung minim potensi kerawanan.

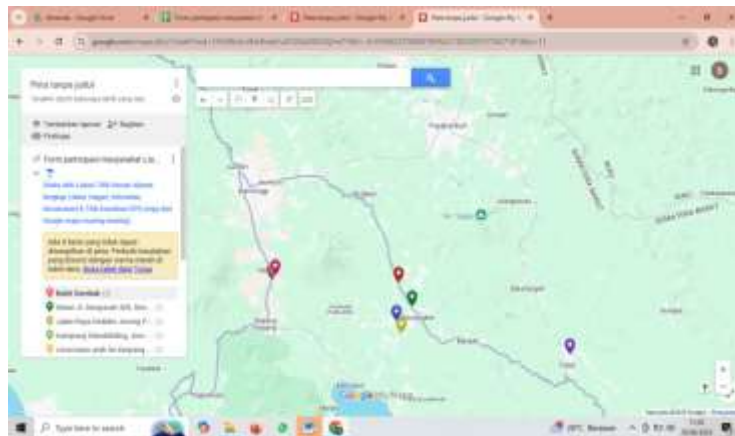
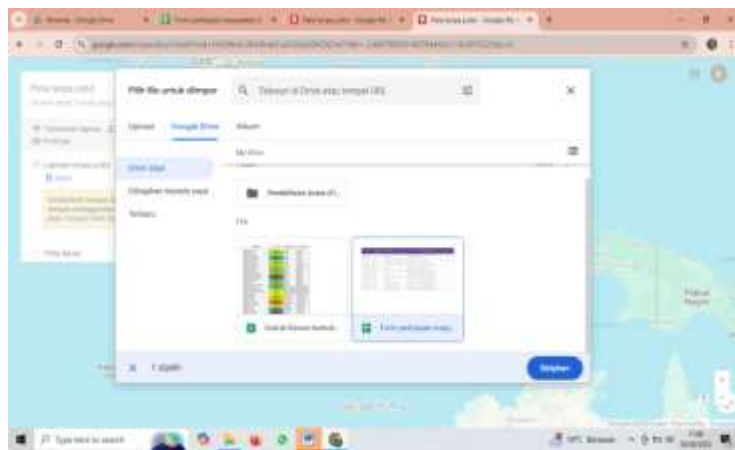
Kegiatan klasifikasi ini saya lakukan dengan cara menandai setiap titik di *Google My Maps* sesuai status prioritasnya **(kompeten & loyal)**. Dengan begitu, peta digital yang dihasilkan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengguna **(berorientasi pelayanan)**.

1.

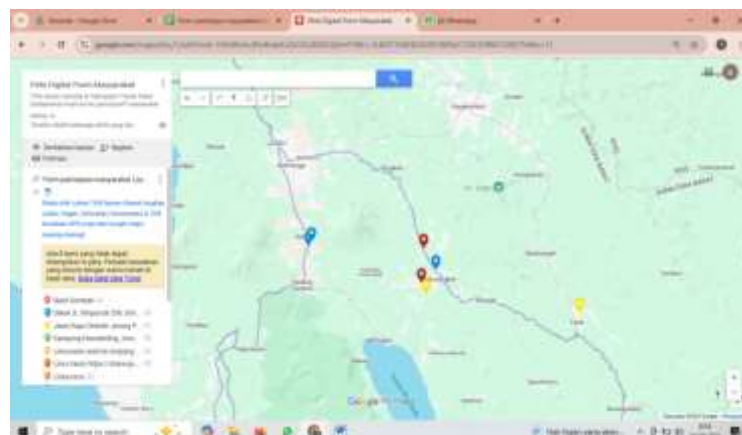


2.





3.



Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4.

c. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Melakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan dari database (<i>Spreadsheet</i>).
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	1 s/d 2 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Laporan database secara berkala. 2. Notulen dan dokumentasi konsultasi dengan mentor.
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Laporan database secara berkala Kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan database <i>Form (spreadsheet)</i> secara berkala kepada mentor (akuntabel). Database ini berisi data hasil pengisian form digital yang sudah disebarkan kepada responden atau masyarakat terkait titik-titik lokasi rawan narkoba. Data tersebut secara otomatis masuk ke dalam <i>spreadsheet</i> sehingga dapat dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Pelaporan kepada mentor dilakukan dengan cara menyiapkan ringkasan data yang sudah terkumpul, kemudian menyampaikan hasil perkembangan tersebut secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (harmonis & kolaboratif). Laporan disusun dalam bentuk <i>spreadsheet</i> yang mudah dibaca, sehingga mentor dapat melihat secara langsung jumlah data yang masuk, sebaran lokasi, maupun hal-hal penting lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut (kompeten). Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mentor selalu mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan data, sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data berjalan sesuai rencana. Dengan adanya laporan berkala, mentor juga dapat memberikan	

masukan atau arahan apabila ditemukan kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengumpulan maupun pengolahan data.

2. Notulen dan dokumentasi konsultasi dengan mentor

Melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal rencana kegiatan aktualisasi untuk memastikan tahapan, waktu pelaksanaan, serta rincian kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan realistis untuk dilaksanakan. Konsultasi ini dilakukan melalui diskusi langsung/koordinasi, dengan tujuan mendapatkan masukan, saran perbaikan, dan persetujuan dari mentor **(kolaboratif)**.

1.



2.



